

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP STABILITAS BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2017)**

SKRIPSI



Oleh

NOVI ISDAYANTI

NIM : 17540008

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP STABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

O l e h
Novi Isdayanti
NIM : 17540008

Telah disetujui tanggal 5 Juni 2021
Dosen Pembimbing,



Barianto Nurasri Sudarmawan, ME
NIDT. 19920420 20180201 1 191

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP STABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2017)**

SKRIPSI

Oleh

NOVI ISDAYANTI

NIM : 17540008

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Hari Sabtu, 5 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.E
NIP. 199007132019031013
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Bariato Nurasri Sudarmawan
NIDT. 19920420 20180201 1 191
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.
NIP. 19761019 200801 2 011

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novi Isdayanti
NIM : 17540008
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeгри (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP STABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Mei 2021

Hormat saya,



Novi Isdayanti

NIM: 17540008

LEMBAR PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, atas izin Allah karya saya yang sederhana ini bisa terselesaikan.

Saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua orangtua tercinta, Bapak Isnaini dan Ibu Endang Tri Sulawati yang senantiasa menyayangi, mencintai, merawat, mendidik, serta mendoakan setiap langkah saya.

Kakak tersayang, Mbak Nurma Eka Yunita Sari dan Adik-adik saya yang selalu bikin saya emosi yaitu Ivan Febriansyah dan Alzam Mubarak terimakasih karena telah mewarnai hidup saya saat dirumah.

Terimakasih juga untuk keponakan saya Elicya Ramadhani (Cece) yang selalu membuat saya tertawa dan Bahagia.

Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih banyak atas diri saya sendiri sudah mampu berjuang sampai detik ini yang tak lepas didukung oleh sahabat dan teman-teman seperjuangan saya

Terimakasih ya Allah, telah menghadirkan orang-orang yang baik dan sayang tulus dengan saya. Terimakasih sudah memberikan kekuatan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

HALAMAN MOTTO

“Aku punya mimpi di dunia dan ingin aku ciptakan mimpi itu di dunia. Mungkin tidak sekarang tetapi nanti. Amin”

-Novi Isdayanti-

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni *Din al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak En ko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Barianto Nurasri Sudarmawan, ME selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta sumbangan pemikiran guna memberi bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Perbankan Syariah (S1) yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini sehingga memperluas pengetahuan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta *staff* Fakultas Ekonomi, terutama jurusan Perbankan Syariah yang telah mengajarkan ilmu dan memberi motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

7. Kedua orang tua, Bapak Isnaini dan Ibu Endang Tri Sulawati, Kakak saya Nurma Eka Yunita Sari dan Adik-adik saya Ivan Febriansyah dan Alzam Mubarak beserta keluarga besar yang telah memberikan do'a, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu saya susahkan dan selalu membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya.
9. Teman-teman Perbankan Syariah kelas A angkatan 2017, dan teman-teman seperbimbingan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu, memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap agar karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya, *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...*

Malang, 19 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan.....	12
1.4 Manfaat.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	23
2.2.1 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	23
2.2.2 Kinerja Keuangan.....	34
2.2.3 Kajian Keislaman	36
2.3 Kerangka Konseptual.....	42
2.4 Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis.....	43
2.4.1 Hubungan Antar Variabel	43
2.4.1.1 Hubungan Komite Audit terhadap Stabilitas Perbankan	44
2.4.1.2 Hubungan Dewan Direksi terhadap Stabilitas Perbankan	47
2.4.1.3 Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap Stabilitas Perbankan	48
2.4.1.4 Hubungan Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Perbankan.....	52

2.4.1.5 Hubungan Dewan Pengawas Syariah terhadap Stabilitas Bank ..	54
2.4.2 Pengembangan Hipotesis	55
2.4.2.1 Hubungan komite audit terhadap Stabilitas Perbankan	55
2.4.2.2 Hubungan dewan direksi terhadap stabilitas perbankan	55
2.4.2.3 Hubungan dewan komisaris independen terhadap stabilitas perbankan	56
2.4.2.4 Hubungan dewan komisaris terhadap stabilitas perbankan	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	58
3.2 Metode Penentuan Populasi dan Sampel	59
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	60
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	60
3.5 Metode Analisis Data	61
1. <i>Estimasi Model Data Panel</i>	62
a. <i>Metode Common Effect (CEM)</i>	62
b. <i>Metode Fixed Effect Model (FEM)</i>	63
c. <i>Metode Random Effect Model (REM)</i>	63
2. Tahap Analisis Data	63
a. Uji Chow	64
b. Uji LM (Lagrange Multiplier).....	64
c. Uji hausman (<i>Hausman Test</i>).....	65
3. Uji Asumsi Klasik.....	65
a. Uji normalitas.....	66
b. Uji multikolinieritas	66
c. Uji Autokorelasi	66
d. Uji heteroskedastisitas.....	66
4. Uji Hipotesis	66
a. Uji T (Parsial).....	66
b. Koefisien Determinasi (R^2).....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	69

4.2 Hasil Penelitian.....	70
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	70
4.2.2 Pemilihan Model dalam Data Panel.....	74
4.2.2.1 Uji Chow	74
4.2.2.2 Uji Hausman	75
4.2.3 Model Terbaik dalam Penelitian	76
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	78
4.2.4.1 Uji Normalitas	78
4.2.4.2 Uji multikolinearitas.....	79
4.2.4.3 Uji autokorelasi	80
4.2.4.4 Uji Heteroskedastisitas.....	81
4.2.5 Uji Hipotesis	82
4.2.5.1 Uji Parsial.....	82
4.2.5.2 Uji Simultan	84
4.2.5.3 Determinasi	84
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
4.3.1. Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan komisaris Independen, dan Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah secara Simultan	85
4.3.2. Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan komisaris Independen, dan Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah secara Parsial.....	86
4.3.2.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Stabilitas BUS.....	86
4.3.2.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Stabilitas BUS.....	91
4.3.2.3 Pengaruh DKI Terhadap Stabilitas BUS.....	94
4.3.2.4 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Stabilitas BUS	99
4.3.2.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Stabilitas BUS	103
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerima IGCGA-III-2017 (Bank-TBK)	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.2 Nilai Komposit <i>Self Assesment Good Corporate Governance</i>	29
Tabel 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian.....	38
Tabel 3.1 Hasil Purposive Sampling.....	54
Tabel 4.1 Daftar Objek Penelitian.....	63
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow.....	68
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Data Panel	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Stabilitas Bank Z-Score (Y)
- Lampiran 2 Data Komite Audit (X1)
- Lampiran 3 Data Dewan Direksi (X2)
- Lampiran 4 Data Dewan Komisaris Independen (X3)
- Lampiran 5 Data Dewan Komisaris (X4)
- Lampiran 6 Data Dewan Pengawas Syariah (X5)
- Lampiran 7 Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 8 Hasil Model *Common Effect*
- Lampiran 9 Hasil Model *Fixed Effect*
- Lampiran 10 Hasil Model *Random Effect*
- Lampiran 11 Hasil Uji Chow
- Lampiran 12 Hasil Uji Hausman
- Lampiran 13 Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 14 Biodata Peneliti
- Lampiran 15 Bukti Konsultasi
- Lampiran 16 Hasil Pengecekan Plagiarisme dengan Turnitin
- Lampiran 17 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

ABSTRAK

Isdayanti, Novi. 2021. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

Pembimbing : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Stabilitas Bank, Kinerja Keuangan.

Saat ini perkembangan *good corporate governance* telah menjadi isu yang sangat global, khususnya di Indonesia. *Good corporate governance* (GCG) merupakan sebuah aturan yang diperuntukkan dalam rangka mengendalikan perbankan. Pada penelitian ini, GCG diprosikan dengan empat indikator yaitu komite audit, dewan komisaris, dewan komisaris independent, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Tujuan peneliiian untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 5 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar OJK pada Tahun 2010-2019. Sampel ini diambil menggunakan Teknik *purposive sampling*. Metode Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dewan direksi, komite audit, dewan pengawas Syariah dan dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap stabilitas bank. Sedangkan variabel dewan komisars independent dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Selain itu, secara simultan variabel dewan direksi, komite audit, dewan komisaris independen, dewan pengawas Syariah dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Kontribusi penelitian ini yaitu untuk memberikan saran kepada setiap perbankan dalam memperhatikan setiap anggota dewan direksi, komite audit, dewan komisaris independent, dewan pengawas syariah dan dewan komisaris yang dapat mempengaruhi stabilitas bank.

ABSTRACT

Isdayanti, Novi. 2021. THESIS. Title: "The Effect of the Implementation of *Good Corporate Governance on the Stability of Islamic Commercial Banks in Indonesia*".

Advisor : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

Keywords : Islamic Banking, Bank Stability, Financial Performance.

Currently, the development of good corporate governance has become a very global issue, especially in Indonesia. Good corporate governance (GCG) is a rule intended to control banking. In this study, GCG is proxied by four indicators, namely the audit committee, the board of commissioners, the independent board of commissioners, the board of directors and the sharia supervisory board. The purpose of this study is to analyze the effect of Good Corporate Governance on the Stability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. The number of samples used were 5 Islamic Commercial Banks in Indonesia registered by the OJK in 2010-2019. This sample was taken using purposive sampling technique. The data analysis method used is panel data regression. The results showed that partially the variables of the board of directors, audit committee, sharia supervisory board and board of commissioners had a significant positive effect on bank stability. While the independent board of commissioners and the board of commissioners variables have no significant effect on bank stability. In addition, the variables of the board of directors, audit committee, independent board of commissioners, Sharia supervisory board and board of commissioners have a significant effect on bank stability. The contribution of this research is to provide advice to every bank in paying attention to each member of the board of directors, audit committee, independent board of commissioners, sharia supervisory board and board of commissioners that can affect bank stability.

تجريدي

(زداياتني)، (نوفي). 2021. أطروحة. العنوان: "تأثير الإدارة الرشيدة للشركات على استقرار المصارف التجارية الشرعية في إندونيسيا".

المستشار: باريانتو نوراسري سودرماوان
الكلمات الرئيسية: الشريعة المصرفية، استقرار البنك، الأداء المالي.

- وقد أصبح تطوير الإدارة الرشيدة للشركات حالياً قضية عالمية جداً، لا سيما في إندونيسيا. الحوكمة الرشيدة للشركات هي قاعدة تهدف إلى السيطرة على الخدمات المصرفية. في هذه الدراسة، تم إنتاج مع أربعة مؤشرات، وهي لجنة التدقيق، ومجلس المفوضين، ومجلس المفوضين المستقل، ومجلس الإدارة ومجلس الإشراف الشرعي. والغرض من التحقيق هو تحليل تأثير الإدارة الرشيدة للشركات على استقرار المصارف التجارية الشرعية في إندونيسيا. عدد العينات المستخدمة في 5 بنوك تجارية شرعية في إندونيسيا سجلتها في. تم أخذ هذه العينة باستخدام تقنية أخذ العينات التنقيية. أسلوب تحليل البيانات المستخدمة هو الانحدار من بيانات اللوحة. وأظهرت النتائج أن مجالس الإدارة ولجان التدقيق ومجالس الإشراف الشرعية ومجلس المفوضين ذات التغييرات الجزئية كان لها تأثير إيجابي كبير على استقرار البنك. وفي الوقت نفسه، فإن متغيرات مجلس المفوضين المستقل ومجلس المفوضين ليس لها تأثير كبير على استقرار البنك. بالإضافة إلى ذلك، في الوقت نفسه، فإن متغيرات مجلس الإدارة ولجان التدقيق ومجلس المفوضين المستقل ومجلس الإشراف الشرعي ومجلس المفوضين لها تأثير كبير على استقرار البنك. و إن مساهمة هذا البحث هي تقديم المشورة لكل بنك في الاهتمام بكل عضو في مجلس الإدارة، لجنة التدقيق، مجلس المفوضين المستقل، مجلس الإشراف الشرعي ومجلس المفوضين التي يمكن أن تؤثر على استقرار البنك.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan *good corporate governance* telah menjadi isu yang sangat global, khususnya di Indonesia. *Good corporate governance* (GCG) merupakan sebuah aturan yang diperuntukkan dalam rangka mengendalikan perbankan. Hal ini untuk menghasilkan *value added* untuk para *stakeholder* karena dengan adanya GCG akan membentuk pola kerja yang bersih, profesional serta terbentuknya pola kerja manajemen yang transparan (Ramdhaningsih, 2013). GCG perbankan diartikan sebagai seperangkat aturan bank yang dapat membantu meyakinkan kepercayaan masyarakat dan memberi motivasi perbankan agar bisa beroperasi dengan efisien yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, karena saat ini *GCG* menjadi salah satu penilaian yang dilihat oleh masyarakat dalam mengambil keputusan (Huq et al., 2018). Perbankan yang pengelolaannya sudah baik dan transparan, berarti bank tersebut sudah menerapkan implementasi *GCG*. Dengan itu *GCG* diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap manajemen, pemerintah, karyawan perbankan, *stakeholder*, konsumen, pemasok, dan lingkungan masyarakat yang berkaitan langsung dengan perbankan bank tersebut.

Stabilitas perbankan adalah sistem perbankan yang kuat dan ulet pada berbagai masalah ekonomi atau gangguan sehingga dapat menjalankan

sistem fungsi intermediasi, melakukan pembayaran dan mendistribusikan risiko dengan baik (Segoviano & Goodhart, 2009). Risiko yang diterima oleh bank adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang negatif dan tidak diinginkan, yang dapat mengakibatkan kegagalan dan kerugian bagi bank. Namun, tanpa risiko operasional bank, bank tidak akan menghasilkan kembali sebagai laba.

Pada penelitian ini, *GCG* diproksikan dengan lima indikator yaitu komite audit, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. *Corporate governance* merupakan keterkaitan antara dewan komisaris, manajemen, *stakeholder-stakeholder* dan investor dalam perusahaan tersebut (Dewi, 2017). Dewan komisaris memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, Dewan direksi memiliki fungsi sebagai pengurus perusahaan, sedangkan komisaris independen memiliki fungsi sebagai kekuatan penyeimbangan pengambilan suatu keputusan oleh dewan komisaris (Effendi, 2017).

Sistem tata kelola perbankan yang efisien di sektor perbankan akan mendorong integritas manajemen bank yang menentukan kualitas pemberian layanan perbankan dan mempengaruhi kinerja sektor secara keseluruhan (Uchenna, 2016). Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika perbankan telah menerapkan tata kelola perbankan yang baik, maka perbankan akan mampu dalam meningkatkan integritas manajemen bank.

Pada tahun 2017 Majalah *Economic Review* melangsungkan kegiatan Indonesia *Good Corporate Governance Award III 2017*. Kegiatan

ini dilakukan sebagai ajang penghargaan untuk perusahaan yang terbaik dalam bidang *Good Corporate Governance* yang memiliki standar penilaian yang *fair* dan obyektif. Kegiatan tersebut dinilai secara langsung oleh dewan juri independen di bidang GCG. Dalam penilaian ini memiliki beberapa kriteria penilaian yaitu laporan tahunan perusahaan bernilai 40%, laporan keuangan audited perusahaan bernilai 25%, kelengkapan soft structure GCG bernilai 10% dan kelengkapan infrastructure GCG bernilai 20%.

Tabel. 1.1 Penerima IGCGA-III-2017 (Bank-TBK)

Bank-TBK	Peringkat
PT. Bank Jatim, Tbk	1
PT. Bank Bukopin, Tbk	2
PT. Bank BTPN, Tbk	3
PT. Bank Artha Graha Internasional	4
PT. Bank Sinarmas, Tbk	5
PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk	6
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	7
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	8
PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk	9

Sumber : Majalah Economic Review, 2017

Dilihat dari Tabel 1.1 bahwa bank Syariah *go public* berada pada posisi ke 7 dan 8 yaitu bank Panin Dubai Syariah, Tbk dan Bank Muamalat, Tbk, yang mana posisi bank syariah berada dibawah 6 bank konvensional. Dari uraian Tabel 1 menunjukkan bahwa *corporate governance* pada bank umum Syariah masih tergolong rendah dibandingkan dengan bank umum

konvensional, padahal dengan menerapkan tata kelola perusahaan bank yang baik maka dapat menarik investor untuk menanamkan modal dan mampu meminimalisir kecurangan. Penerapan tata kelola perusahaan bank yang baik juga diharapkan mampu menjaga profitabilitas yang *kontinue*.

Pedoman GCG yang telah dikeluarkan pada tahun 1999 telah membuat adanya sedikit perubahan-perubahan, perubahan tersebut terjadi pada sektor perbankan di dalam negeri (KNKG, 2006). Menurut media lokal CnnIndonesia, PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk termasuk Top Emiten di Good Corporate Governance di ASEAN. Pada laporan PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia berhasil meraih prestasi sebagai Top 3 Terbaik di Indonesia dan Top Emiten Terbaik di Asia Tenggara semua itu diraih oleh PT Bank Danamon pada tahun 2015 (PT Danamon, 2016). Selain PT Bank Danamon yang meraih prestasi pada Corporate Governance Scorecard, PT Bank CIMB Niaga juga dikategorikan sebagai salah satu dari 50 perbankan yang sesuai dengan standar (PT Bank CIMB, 2018). Dengan ditemukannya hanya ada dua emiten terbaik di ASEAN *Corporate Governance Scorecard* memunculkan kesadaran bahwa *corporate governance* ini penting untuk diterapkan.

Penerapan *GCG* penting diterapkan untuk memobilisasi dan mengalokasikan modal serta pertumbuhan produktivitas perbankan. Ketika perbankan menerapkan struktur *GCG* maka bank dapat menghasilkan alokasi modal yang efisien, meningkatnya pangsa pasar serta memberikan pengaruh positif pada praktik tata kelola (*corporate governance*) perbankan

yang lain (Levine, 2004). Berdasarkan ilustrasi krisis moneter banyak perbankan yang kesulitan untuk memobilisasi modal dan mengalokasikan modal tersebut sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat secara luas. Dengan adanya penerapan GCG hal ini dapat memastikan bahwa memobilisasi modal dan mengalokasikan modal itu dapat dikerjakan oleh perbankan dengan baik.

Dampak dari tidak adanya penerapan GCG pada suatu perbankan akan sangat rentang terjadi kasus penyimpangan pengelolaan keuangan salah satunya terjadinya penggelapan dana masyarakat. Hal ini karena dana masyarakat tidak dipergunakan atau dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Menurut Media lokal infobanknews , Lando Simatung kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPII) melakukan survei terkait dengan penerapan good corporate governance di dindustri perbankan yang menunjukkan bahwa praktik GCG terlihat mulai menurun dengan maraknya pembobolan dana ataupun praktik *fraund* yang telah dihadapi oleh perbankan. selain itu tantangan penerapan GCG akan semakin besar keika perbankan mulai menggunakan terknologi digital dala setiap pelayanan dan produk.

Di Indonesia ada beberapa bank yang disinyalir adanya aktivitas penggelapan dana yang di gubris dari beberapa media lokal. Salah satu contohnya pada tahun 2013 Bank Mandiri Syariah menurut media lokal CnnIndonesia terjadi kasus penggelapan dana sebesar Seratus Dua Miliar Rupiah yang terjadi di Bank Mandiri Syariah (BSM) yang dilakukan oleh

kepala cabang pembantu BSM, kepala cabang utama BSM, dan account officer BSM. Dengan adanya sinyalir penggelapan dana yang terjadi di bank mandiri syariah (BSM) membuat masyarakat kurang mempercayai Bank Mandiri Syariah, pandangan masyarakat akan terus menganggap bahwa bank konvensional dan bank syariah tidak ada perbedaan. Artinya dengan adanya penerapan GCG maka dapat meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perbankan bank, sehingga ada perlindungan konsumen yang dilakukan secara internal oleh perbankan.

Perbankan syariah maupun bank konvensional diharapkan dapat menerapkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk menjadi acuan agar dapat meminimalisir sebuah tindakan-tindakan yang dapat merugikan *stakeholder*. Tata kelola perbankan membutuhkan tingkat akuntabilitas yang tinggi, karena setiap perbankan perbankan harus bisa berupaya dalam mempublikasikan peran dan tanggung jawab dewan dan manajemen untuk membuatnya bertanggung jawab terhadap pemegang saham (Olayemi, 2017). Semua itu dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan kepada para investor bahwa dalam menjalani usaha dengan transparansi, sehingga tidak ada penipuan terhadap akuntabilitas. Dalam perbaikan praktik *corporate governance* perbankan dapat mendorong likuiditas pasar, kepercayaan investor dan pembentukan modal karena pengungkapan keuangan yang lebih baik (Donalson, 2003). Meningkatnya kepercayaan investor akan mendorong investasi baik dari investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri.

Penerapan GCG pada setiap perbankan akan memberikan suatu analisis efisiensi pada setiap perbankan. Perbankan yang kurang efisien dapat digabungkan dengan perbankan yang lebih efisien, yang mana konsep tersebut biasa disebut dengan *merger*. *Merger* merupakan salah satu strategi eksternal perbankan yang dipilih perbankan untuk bisa mempertahankan hidupnya. Hal ini dianggap sesuai dengan tuntutan persaingan yang mengharuskan untuk menghasilkan peningkatan dengan cepat (Trihastuti & Dewi, 2016). Perubahan kepemilikan yang terjadi karena *merger* telah mengubah sistem perbankan, seperti dorongan perubahan kebijakan pemerintah dan krisis keuangan. Perbankan yang melakukan merger sebagai usaha cara untuk bertahan dalam kompetisi. Dengan demikian, diharapkan jika *merger* perbankan dilakukan maka bisa mempunyai aset modal yang kuat dari segi finansial, sistem teknologi informasi, SDM (Sumber Daya Manusia), dan layanan keuangan dan produk di perbankan.

Indonesia Saat ini sedang berfokus pada fenomena terkait dengan adanya penggabungan dua perbankan atau lebih (*merger*). Pasalnya dengan perbankan melakukan merger maka perbankan akan mengalami dinamika yang baru. Proses penggabungan perbankan juga akan mengalami pengalihan aktiva dan passiva dari perbankan yang menggabungkan. Disisi lain dengan perbankan melakukan merger maka akan menyebabkan *goodwill* bagi perbankan (Maharani & Wulandari, 2017). Fenomena merger ini diprediksi akan mengalami perubahan profitabilitas atau stabilitas bank di masa yang akan datang. Beberapa bank yang melakukan penggabungan

perbankannya (*merger*) menggambarkan bahwa ada permasalahan yang serius di industri perbankan. Ketika industri keuangan perbankan mengalami banyak masalah, barulah merasakan bahwa pentingnya dalam penerapan *good corporate governance* di setiap perbankan.

Dengan melakukannya *merger* pada beberapa Bank Umum Syariah (BUS) menjadikan suatu kajian penting untuk diteliti. Kajian ini diperlukan untuk melihat setiap tata kelola perbankan, jika hasil dari *good corporate governance* nya semua bagus maka kemungkinan di *merger* akan bagus. Dan jika tata kelola perbankan (*corporate governance*) ada yang berhubungan keterbalikan atau tata kelola perbankannya mayoritas minus maka akan menjadi alasan yang sangat tepat bagi perbankan untuk melakukan *merger* (Loekita dan Sukatha, 2016). Alasan tersebut untuk memperkuat dan menerapkan kembali tata kelola perbankan yang baik. Namun, jika hasil dari *good corporate governance* di perbankan mayoritas menghasilkan positif, *merger* juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan, semua itu tergantung dengan tujuan atau kebutuhan masing-masing setiap perbankan.

Pada bulan Juli tahun 2020, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan dalam berita Cnbc Indonesia bahwa akan ada peleburan tiga anak usaha syariah milik bank pelat merah. Ketiga bank tersebut antara lain, PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Keberencanaan dalam penggabungan bank anak BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah

Mandiri (BSM), yang direncanakan oleh kementerian BUMN bertujuan untuk menjadikan bank syariah di Indonesia bisa memiliki daya saing. Dengan demikian dengan melakukan merger menjadi salah satu strategi alternatif pertumbuhan secara eksternal untuk mencapai tujuan perbankan serta membangun keunggulan perbankan dalam jangka panjang yang akan meningkatkan nilai perbankan bank, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perbankan. Dengan demikian diharapkan dengan adanya pengaruh penerapan *good corporate governance* dapat memberi pengaruh terhadap stabilitas pada bank yang melakukan merger

Dalam konsep ekonomi mengenai teori investasi mengemukakan bahwa keuntungan akan berbanding lurus atau sejajar dengan resiko, dimana jika resiko semakin besar maka keuntungan yang didapat juga lebih besar, dan sebaliknya, dengan Istilah yang biasanya sering disebut *high risk high return* (Rachmawati, 2020). Perbankan merupakan salah satu usaha yang *high risk high return* karena aktivitasnya yang berhubungan dengan permodalan atau keuangan, sehingga segala bentuk konsekuensi harus siap akan terjadinya, dengan demikian risiko yg kemungkinan terjadi itu diatasi oleh pihak bank dengan cara menjalankan usahanya sebaik mungkin yakni dengan cara memberikan permodalan sebanyak mungkin kepada nasabah dengan baik agar sirkulasi keuangan tetap terjaga, kemudian di sisi internal bank juga menguatkan ancaman risiko tersebut dengan penerapan GCG, sebab dengan adanya penerapan GCG bank telah memiliki perencanaan

jangka panjang terkait dengan kelanjutan usahanya berdasarkan tujuan-tujuan yang dibangun.

Tata kelola perbankan yang baik akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu juga meningkatkan akses pembiayaan eksternal oleh perbankan, meningkatkan kinerja operasional dan menurunkan biaya modal (Fanta, 2013). (Diamond & Rajan, 2009) mengatakan bahwa lembaga keuangan yang memiliki tata kelola perbankan yang berkualitas tinggi akan cenderung bisa menetapkan insentif dan kontrol yang sesuai sehingga dalam praktik pengambilan risiko perbankan masih bisa mempertahankan atau meningkatkan nilai pemegang saham. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perbankan yang memiliki *good corporate governance* akan menyebabkan peningkatan nilai usaha dan stabilitas bank yang lebih baik. Tata kelola perbankan yang kuat dianggap dapat meningkatkan stabilitas perbankan dan memaksimalkan pengembalian, dan tata kelola perbankan yang lemah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan aset perbankan (Ahmed & Duellman, 2007).

Pada dasarnya manajemen perbankan memiliki fungsi dalam pengelolaan perbankan untuk mencari keuntungan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemilik perbankan. Tugas utama dari manajemen yaitu menciptakan kinerja yang efektif serta efisien, sehingga membuat peningkatan kapabilitas dan kelancaran keberlangsungan financial perusahaan. Keberhasilan dari itu semua dapat dicapai dengan cara

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *good corporate governance* secara menyeluruh (Nugroho & Bararah, 2018). (Riandi dan hasan, 2011) mengemukakan bahwa kegiatan GCG itu didasarkan dengan mempunyai tujuan untuk meningkatkan keefektifitas operasional sehingga akan memiliki dampak yang positif terhadap stabilitas suatu perbankan yang salah satunya yaitu meningkatkan profitabilitas bank. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan GCG mampu memberi peningkatan stabilitas perbankan karena pencapaian kinerja yang didapat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, didapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh simultan antara Komite Audit, Dewan direksi, Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh positif antara Komite Audit terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh positif Dewan Direksi terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah ada pengaruh positif Dewan Komisaris Independen terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah ada pengaruh positif Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

6. Apakah ada pengaruh positif Dewan Pengawas Syariah terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara Komite Audit, Dewan direksi, Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari Dewan Direksi terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari Komite Audit terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari Dewan Komisaris Independen terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari Dewan Komisaris Independen terhadap Stabilitas Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat

Dari penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat, antara lain:

- a. Bagi Perbankan

Penelitian ini bisa digunakan untuk acuan suatu perbankan agar bisa lebih meningkatkan kemandirian dan fungsi dari setiap organ *corporate* perbankan antara lain Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Dewan

Komisaris Independen sehingga bisa memberi peningkatan kualitas *good corporate governance* untuk meningkatkan Stabilitas Perbankan di Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi Institusi

Bisa menjadi penambahan referensi penelitian di Fakultas Ekonomi Khususnya di jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta bisa menjadi penambahan bukti empiris dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan praktik *good corporate governance* terhadap Stabilitas Perbankan, dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang sama dan yang bisa diterapkan di masa yang akan datang.

c. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman yang baru serta mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap stabilitas perbankan di Bank Umum Syariah di Indonesia

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan supaya mempunyai bahan yang dapat digunakan untuk suatu acuan dan perbandingan. Beberapa penelitian yang ada pada table diatas telah mencoba membahas terkait pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap stabilitas perbankan. penelitian-penelitian tersebut diantara yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Shungu dkk (2014) dan Olayemi (2017) menghasilkan hubungan positif antara dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian Indriyani dan Rinda Asytuti (2019) dan dewi dkk (2018) menghasilkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Fitri Yunina dan Nurul Nisa (2019) mendapatkan hasil yaitu komite audit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shungu dkk, (2014) dan Fanta dkk (2013) menghasilkan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Indriyani dan Rinda Asytuti (2019), Arry Eksandy (2018) dan Younas dkk (2018) juga menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara komite audit dengan kinerja keuangan.

Penelitian Arry Eksandy (2018) menghasilkan dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah. Namun,

pada penelitian Indriyani dan Rinda Asytuti (2019) dan menghasilkan dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Udeh dkk (2017) dan Fanta dkk (2013) menghasilkan adanya pengaruh negatif antara dewan direksi dengan kinerja keuangan.

Penelitian Indriyani dan Rinda Asytuti (2019) dan Arry Eksandy (2018) menyebutkan bahwa dewan pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang diukur dengan ROA.

Penelitian Fitri Yunina dan Nurul Nisa (2019) dan Dewi dkk (2018). Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS.

Bashir dkk (2017). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hasil menggambarkan bahwa ukuran dewan dan kepemilikan institusional berhubungan tidak signifikan dengan ROA, ROE dan EPS.

Penelitian yang dilakukan oleh Syed Moudud-ulu-huq, changjun zheng, dan anupam das gupta (2018). Hasil menunjukkan bahwa tata kelola perbankan merupakan mekanisme yang baik untuk mengurangi risiko selama krisis keuangan global, ada hubungan negatif berbentuk antara tata kelola perbankan, profitabilitas, dan pengambilan risiko, secara khusus tata kelola perbankan pada bank syariah lebih unggul dari bank konvensional yang dapat meningkatkan stabilitas efisiensi dan tata kelola perbankan memiliki efek jangka panjang pada profitabilitas dan perilaku pengambilan risiko.

Tabel 2.1

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Variabel	Tujuan	Hasil
1	Progress Shungu, Hlanganipai Ngirande, dan Godfrey Ndlovu (2014)	Impact of Corporate Governance on the Performance of Commercial Banks in Zimbabwe	<i>-Unit Root Test - Granger Causality Test</i>	Variabel dependen: Kinerja Perbankan (ROE) Variabel Independen: <i>board size, board composition, internal board committees and board diversit</i>	Dilakukan untuk menyelidiki dampaknya tata kelola perbankan terhadap kinerja bank komersial di Zimbabwe.	Terdapat hubungan positif antara komposisi dewan komisaris, keberagaman dewan komisaris dan kinerja bank umum, walaupun memiliki hubungan negatif hubungan antara komite dewan dan kinerja bank
2	Syed Moudud-ulu-huq, changjun zheng, dan	Does bank corporate governance matter for bank performan	generalized method of moments	Variabel dependen: Kinerja keuangan (ROA,	Penelitian ini bertujuan memeriksa apakah bank yang memiliki tata kelola	GCG mendorong keuntungan bagi bank, selain meningkatkan

	anupam das gupta (2018)	ce anda risk-taking? New insights of an emerging economy	(GMM) and dynamic ordinary least square (DOLS)	ROE, NPL) Variabel Independen: GCG (Bank size, Income Diversification, Employee Productivity, Liquidity, freedom, dan Global financial Crisis)	perbankan yang (corporate governance) memiliki pengaruh heterogen terhadap profitabilitas dan pengambilan risiko di tengah krisis.	an efisien dalam manajemen biaya dan nilai bank, GCG juga bertindak sebagai mekanisme yang dapat mengurangi risiko bank dan menjaga kestabilan secara financial dan efisien waktu kewaktu dalam keadaan krisis.
3	Arry Eksandy (2018)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan pada perbankan	Metode analisis regresi data panel	Variabel dependen = Kinerja keuangan (ROA) Variabel independen = GCG	Mencari pembuktian secara empiris pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja	Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen,

		syariah Indonesia		(Dewan Direksi, Dewan komisaris independe n, dewan pengawas syariah dan komite audit)	keuangan perbankan syariah.	komite audit dewan pengawas syariah dan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4	Indriyani dan Rinda Asytuti (2019)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governan ce</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	Analisis uji Regresi Linear Bergand a	Variabel Dependen = <i>Good Corporate Governan ce</i> (Ukuran Dewan Komisaris , Dewan Direksi, Komite Audit, DPS dan Islamic Social Reporting) . Variabel Independe n =	Menemukan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan pebankan syariah yang diukur dengan Return On Assets (ROA).	ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh

				Kinerja Keuangan (ROA)		signifikan terhadap ROA dan islamic social reporting berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA
5	Olayemi Ayoola-akinjobi (2017)	Impact of corporate governance on banks profitability, study of selected commercial banks in Nigeria	Metode analisis regresi	Variabel dependen = Profitabilitas (ROE) Variabel Independen = GCG (komposisi dewan dan ukuran dewan)	Menguji pengaruh GCG terhadap profitabilitas bank di Nigeria	Komposisi dewan komisaris berkorelasi positif terhadap laba bank sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.
6	-Udeh, Francis Nnoli	Impact of corporate governance	Ordinary Least Squares	Variabel Dependen =	Bertujuan untuk mengevaluasi	Komposisi dewan tidak berpengaruh

	-Abiahu Mary-Fidelis Chidoziem - Tambou,Liberty Ejomafuvwe (2017)	Effect on firms financial performance: A study of quoted banks in Nigeria. The Nigerian Accountant	Regression Analysis	Kinerja Keuangan (ROCE) Variabel Independen = Good Corporate Governance (Dewan Komisaris)	Dampak Corporate Governance pada kinerja keuangan perbankan di Nigeria.	negatif. Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan
7	Fitri Yunina dan Nurul Nisa (2019)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017	Metode Regresi Linear Berganda	Variabel Dependen = Kinerja Keuangan (ROE) Variabel Independen = Good Corporate Governance (Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Independen)	Menemukan pengaruh good corporate governance yang dilihat dari sisi dewan komisaris independen dan komite audit independen terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio	Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial Dewan Komisaris Independen berpengaruh

					<i>Return On Equity (ROE).</i>	negatif, sedangkan koite audit independen berpengaruh positif.
8	Mushtaq Younas, Umair Ahmded dan Dr.Naveed (2018)	Impact of corporate governance of islamic Banks on financial performance: a study of Pakistan, india and bangladesh islamic banking System	Metode penelitian Data Panel	Variabel Dependen = Kinerja Keuangan (ROA) Variabel Independen = Board Size, Board Independen, Audit Committee, Firm Size	Untuk mengevaluasi pengaruh CG terhadap kinerja keuangan bank syariah di Pakistan	Ukuran bank, Ukuran Dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan Dewan Independensi dan komite audit tidak berpegaruh signifikan.
9	Aminar Sutra Dewi, Desfriana Sari, dan Henryanto Abaharis (2018)	Pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap Kinerja perbankan	Metode analisis berganda	Variabel Dependen= Kinerja Keuangan Variabel Independen = dewan komisaris ,	Untuk menguji pengaruh dari dewan komisaris independen , latar belakang pendidikan	komposisi dewan Komisaris Independen berpengaruh positif, ukuran

		manufaktur di bursa efek Indonesia		latar belakang Pendidikan dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris independen	dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.	dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan perbankan dan latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.
10	Ashenafi Beyene Fanta, Kelifa Srmolo Kemal, dan Yodit Kassa Waka (2013)	Corporate governance and impact on bank performance	Metodo analisis statistik deskriptif dan analisis regresi multivariat.	Variabel dependen= kinerja bank (ROA dan ROE) Variabel Independen	bertujuan untuk menguji mekanis me tata kelola perbankan dan dampaknya terhadap	dewan direksi dan keberadaan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap

				= GCG (ukuran bank, komite audit, dan dewan direksi)	kinerja PT bank komersial dengan tidak adanya bursa saham yang terorganisir.	kinerja bank; sedan gkan ukuran bank berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap kinerja bank
1 1	Uzma Bashir, Ummara Fatima, Sundas Sohail, Farhat Rasul, Rabia Mehboob (2017)	Internal Corporate Governance and Financial Performance Nexus; a Case of Banks of Pakistan	Regresi data panel	Variabel dependen= kinerja keuangan (ROE, ROA dan EPS) Variabel Independen = Board structure dan ownership structure)	Kajian ini berupaya mengukur dampak internal indikator tata kelola terhadap kinerja keuangan	Hasil menggambar bahwa ukuran dewan dan kepemilikan institusional berhubungan tidak signifikan dengan ROA, ROE dan EPS

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Good Corporate Governance (GCG)e

2.2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perbankan diartikan sebagian sekumpulan hubungan antara majamenen perbankan, dewan komisaris dan pemegang saham, serta pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perbankan. (Bastomi et al., 2017)

a. Ukuran Dewan Komisaris

Beberapa yang harus dikemukakan terkait dengan Dewan Komisaris yaitu terkait komposisi, jumlah, kriteria dan independensi. Dewan komisaris memiliki jumlah setidaknya paling sedikit 3 orang atau bisa berjumlah paling banyak setara dengan jumlah dewan direksi, data dewan komisaris minimal ada 1 orang yang harus berdomisili Indonesia. Dewan komisaris dipimpin langsung oleh komisaris Utama atau Presiden Komisaris. (Anshori, 2008)

Rujukan yang paling dasar untuk melihat Dewan Komisaris adalah PBI Nomor 8/4/PBI/2008, yang membahas tentang ukuran dewan komisaris pada suatu perbankan perbankan paling rendah kurang dari dua orang yang terdiri dari komisaris dan komisaris independen.

b. Ukuran Dewan Direksi

Berdasarkan PBI 8/4/PBI/2008, jumlah dari anggota direksi paling sedikit terdiri dari 3 orang. Ukuran dewan direksi dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggota dewan direksi yang ada di dalam perbankan.

c. Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah dewan pengawas dan pengawansan internal yang diketuai oleh direktur eksternal yang megawasi keefektifitas operasi dan tindakan dewan direksi. Dewan komite merupakan tolak ukur berfungsinya

bank dengan lebih baik lagi (Shungu et al., 2014). (Romano & Guerrini, 2012) berpendapat bahwa komite audit adalah alat tata kelola perbankan yang penting untuk memantau aktivitas perbankan dan perlindungan nilai pemegang saham.

Tujuan dibentuknya komite audit dalam keputusan menteri nomor 117 tahun 2002 yaitu untuk membantu dewan pengawas atau komisaris dalam memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Sedangkan menurut Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang diedarkan pada tahun 2003 mengatkan bahwa tujuan dari komite audit adalah membantu dewan komisaris (Eksandy, 2018a).

d. Ukuran Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI2009 yaitu para anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai atau memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan para pemegang saham pengendali. Jumlah dewan komisaris independen dinyatakan paling kurang 50% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris adalah komisari independen. selain itu, dewan komisaris independen juga tidak boleh mempunyai keterikatan hubungan antara keuangan dan kepemilikan saham dengan bank sehingga bisa mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. dewan komisaris independen memiliki tugas untuk membantu para dewan komisaris untuk menjalankan tugasnya agar berjalan dengan efektif dan efisien (Eksandy, 2018).

e. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 3 mengemukakan bahwa Dewan pengawas Syariah yaitu anggota yang mempunyai suatu kompetensi yaitu yang mempunyai pengalaman serta pengetahuan pada Syariah muamalah, keuangan atau perbankan secara umum. Sedangkan reputasi bisa disebutkan sebagai rekam jejak anggota DPS dalam meningkatkan stabilitas perusahaan (Nugrehani, 2018).

2.2.1.2 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tujuan dari *Good Corporate Governance* (GCG) dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Menurut UU BUMN terdapat 6 tujuan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

- a. Supaya bisa memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dapat dipercaya, adil dan bertanggung jawab supaya perbankan mempunyai daya saing yang kuat dalam nasional maupun internasional.
- b. Supaya bisa mengendalikan BUMN secara transparan, professional, efiseien serta menumbuhkan kemandirian organ perbankan.
- c. Mendorong organ supaya bisa menjalankan kegiatannya dilandari oleh nilai moral yang tinggi serta membuat peraturan sesuai dengan perundang-undangan.
- d. Menumbuhkan rasa yang besar dalam ikut serta kontribusi BUMN dalam [erekonomian nasional.
- e. Menumbuhkan iklim investasi nasional

f. Memberhasikan program privatisasi (Effendi, 2017).

2. Menurut kementerian BUMN terdapat 5 tujuan *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN supaya perbankan bisa mempunyai daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional, sehingga bisa bertahan untuk mencapai dan tujuan BUMN.
- b. Supaya bisa Mengendalikan BUMN secara transparan, professional, efisien serta menumbuhkan kemandirian organ perbankan.
- c. Mendorong organ supaya bisa menjalankan kegiatannya dilandari oleh nilai moral yang tinggi serta membuat peraturan sesuai dengan perundang-undangan.
- d. Menumbuhkan rasa yang besar dalam ikut serta kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Menumbuhkan iklim investasi nasional (Effendi, 2017).

Menurut Indra Surya (2006) dalam (Effendi, 2017), penerapan *Good Corporate Governance* memiliki beberapa tujuan terhadap perbankan, sebagai berikut:

- f. Memudahkan dalam mengakses investasi domestik dan asing.
- g. Memperoleh *cost of capital* yang lebih murah.
- h. Memberikan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- i. Memberi peningkatan kepercayaan dan keyakinan dari para pemangku kepentingan.

- j. Melindungi komisaris dan direksi dari tuntutan hukum.

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Prinsip transparansi

Perbankan adalah salah satu institusi yang keberadannya sangat membutuhkan sebuah kepercayaan dan masyarakat, karena jika kepercayaan dai masyarakat sudah hilang maka masyarakat sudah tidak akan menggunakan jasa perbankan tersebut. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, hendaknya bank mampu melaksanakan prinsip *Good Corporate Governanace* (GCG) dengan optimal.

Semua perbankan diminta untuk bisa menyampaikan berbagai macam laporang yang secra rutin yang diwajibkan oleh perusahaan, antara lain laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan interim, laporan keuangan yang diaudit (Rusdiyanto dkk, 2019).

Prinsip transparansi ini mengharuskan adanya informasi yang terbuka, jelas, serta tepat waktu dan bisa diperbandingkan yang menyangkut suatu keadaan keuangan, kinerja operasional, pengelolaan perbankan dan kepemilikan perbankan, yaitu sebagai berikut:

- A. Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang:
 - a. Hasil operasi perusahaan dan Keuangan
 - b. Tujuan-tujuan dari perbankan
- B. Informasi harus audit disiapkan lalu disiapkan serta diungkapka sesuai dengan standart yang sesuai pada akuntansi perbankan.

- C. Pemeriksaan tahunan dilakukan oleh auditor independen yang bertujuan untuk memberi jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang bagaimana cara penyajian laporan keuangan.
- D. Ketika menyebarkan informasi harus bisa memberi cerminanan keadilan serta efisiensi biaya agar hasil informasi bisa relevan.

2. Prinsip akuntabilitas

Bank Syariah dan UUS harus melapor laporan keuangan kepada Bank Indonesia, laporan keuangan tersebut berupa perhitungan laba rugi, neraca tahunan serta laporan berkala lainnya (Anshori, 2008). Prinsip Akuntabilitas yang dimaksud yaitu prinsip mengatur tanggungjawab dan peran manajemen dalam pengelolaan perbankan dapat mempertanggungjawabkan dan mendukung usaha untuk menjaga keseimbangan pemegang saham dan manajemen, dimana pengawasan langsung oleh dewan komisaris. Dalam hal ini Dewan komisaris memberikan pengawasan kepada manajemen terkait dengan kinerja serta pencapaian target yang telah ditentukan bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini menjadi efektif, maka perlu dijaga independensinya dari pengaruh manajemen. Perbankan yang menerapkan prinsip akuntabilitas salah satu cara dalam mengatasi problem yang muncul karena adanya pembagian pekerjaan antar organ perbankan dan dapat mengurangi risiko dari agency problem yang muncul karena ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham manajemen dan pemangku kepentingan.

Ada tiga tingkatan akuntabilitas, sebagai berikut:

a. Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individual menyatakan bahwa kaitan akuntabilitas pada posisi atasan-bawahan.

b. Akuntabilitas tim

Akuntabilitas tim menyatakan bahwa akuntabilitas akan ditanggung secara bersamaan oleh suatu organisasi kerja atas situasi Dari kinerja yang akan dicapai.

c. Akuntabilitas korporasi

Akuntabilitas korporasi Akuntabilitas kepada akuntabilitas perbankan yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kedudukannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini seluruh kegiatan perbankan akan dipertanggung jawabkan (Effendi, 2017).

3. Prinsip Responsibilitas

Perbankan harus memperhatikan pengelolaan perbankan harus dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam mencerminkan suatu tanggungjawab korporasi yang baik. Perbankan wajib memperhatikan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan-undangan serta mengupayakan salam etika bisnis yang sehat (Effendi, 2017).

4. Prinsip Independensi

Perbankan percaya jika kemandirian merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap perbankan agar organ dalam perbankan dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta bisa membuat keputusan-keputusan yang baik bagi perbankan. Saat organ perbankan akan melakukan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian tidak ada yang bisa mencampuri pengelolaan perbankan selain dari organ perbankan itu sendiri.

5. Prinsip kesetaraan

Perbankan harus menerapkan prinsip kesejahteraan yang mengandung makna bahwa harus memiliki perlakuan yang sama atau setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham dan investor asing, yaitu seluruh pemegang saham dengan kelas yang sama wajib memperoleh perlakuan yang setara (Effendi, 2017).

2.2.1.4 Ruang Lingkup Corporate Governance

Corporate governance memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi beberapa perbankan atau industri, antara lain, perbankan jasa, manufaktur, dan lain-lain.

a. *Corporate Governance* di Bank Umum

Pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Tujuan dari peraturan tersebut yaitu supaya bisa memperbaiki situasi internal perbankan nasional ketika menghadapi beberapa masalah yang komplis, berjuang untuk melindungi

kepentingan pemangku kepentingan dan menjaga kepatuhan pada nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap industri perbankan. Pokok-pokok penerapan GCG diterapkan pada pelaksanaan tanggung jawab dan tugas dewan direksi dan komisaris, pelaksanaan tugas komite-komite dan kelengkapan, satuan kerja yang menjalankan fungsi pengadilan internal bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen resiko, rencana strategis bank, sistem pengendalian dana besar serta transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank. Dalam ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh PBI pada tanggal 30 Januari 2006, maka seluruh perbankan diharuskan untuk melakukan penyusunan laporan pelaksanaan GCG secara berkala, penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan GCG, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap perbankan diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG pada seluruh kegiatan usahanya. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada ayat 1 setidaknya bisa menerapkan tujuh hal, yaitu:

1. Tanggung jawaban dan pelaksanaan tugas dewan direksi dan komisaris
2. Penerapan auditor internal, fungsi kepatuhan, dan auditor eksternal.
3. Penerapan manajemen resiko
4. Transparansi kondisi keuangan dan non bank.
5. Pelaksanaan dan kelengkapan tugas komite-komite
6. Rencana strategi bank

Setiap perbankan harus melakukan penerapan kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip *good corporate governance*. Demikian, tujuan dari prinsip GCG ini supaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan, meningkatnya stabilitas bank dan nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan.

2.2.1.5 Penerapan GCG Pada Perbankan Syariah

Dalam upaya meningkatkan serta perbaikan kualitas penerapan *Good corporate governance* bank diminta untuk melakukan *self assessment* secara komprehensif. Ketika perbankan merasa memiliki kekurangan dalam penerapannya, maka bank harus segera menetapkan langkah perbaikan yang sekiranya diperlukan. *Self assessment good corporate governance* yaitu penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG yang memuat 11 faktor penilaian penerapan GCG.

Tabel 2.2
Nilai Komposit *Self Assesment Good Corporate Governance* Menurut Bank Indonesia

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 < Nilai Komposit 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit 3,5	Cukup Baik
3,5 ≤ Nilai Komposit 4,5	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit 5	Tidak Baik

Sumber : Lampiran SE BI No.9/12/DPNP

2.2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yaitu gambaran suatu keadaan secara lengkap atas perbankan selama jangka waktu tertentu yang merupakan hasil dari kegiatan operasional perbankan ketika dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kinerja perbankan dilihat dari perspektif keuangan mempunyai hubungan dengan profitabilitas. Dalam perspektif keuangan strategis perbankan akan mempengaruhi nilai pemegang saham (Nuswandari, 2009). Kinerja keuangan adalah kemampuan perbankan untuk menghasilkan sumber daya baru, dari operasi sehari-hari selama periode waktu tertentu dan diukur dengan laba bersih dan kas dari operasi (Poudel, 2012). Kinerja keuangan suatu perbankan juga dapat diartikan sebagai suatu prospek dimasa depan, potensi pertumbuhan dan perkembangan yang aman dan baik bagi perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan salah satu factor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan (Supriatna & M. Kusuma, 2009). Penilaian kinerja keuangan mempertimbangkan dampak keuangan kumulatif terkait dengan data keuangan yang dipublikasikan yang menjadikan prinsip akuntansi keuangan secara umum. Kinerja keuangan dapat dilihat dari instrumen analisis. Analisis kinerja keuangan sebagai proses penilaian secara kritis untuk mereview data, menghitung, mengukur, menginterpretasikan, dan memberikan solusi terhadap keuangan perbankan pada periode tertentu.

Tata kelola perbankan juga menyediakan struktur dimana tujuan perbankan ditetapkan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara

memantau stabilitas perbankan. Tidak adanya *corporate governance* yang baik seringkali disalahkan atas kinerja buruk pada perbankan. Sistem tata kelola perbankan yang efisien di sektor perbankan akan mendorong integritas manajemen bank yang menentukan kualitas pemberian layanan perbankan dan mempengaruhi kinerja sektor secara keseluruhan (Uchenna, 2016). Hal tersebut menjelaskan bahwa jika dalam perbankan sudah menerapkan tata kelola perbankan yang baik, maka perbankan akan mampu meningkatkan integritas manajemen bank dan kemampuannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyampaian layanan perbankan yang berorientasi pada kualitas.

Kerjasama antara pemegang saham pemilik dan agen (manager) merupakan suatu motivasi bagi perbankan dalam melakukan kinerjanya. Saat ini perbankan telah memisahkan kepemilikan dan kontrol manjerial, serta pemilik perbankan tidak semua anggota manajemen tingkat tinggi. Dengan adanya pemisahan ini, tidak bisa terhindarkan munculnya masalah keagenan. Akibatnya, seluruh manajer perbankan dan *stakeholder* bertugas untuk meminimalisir konflik kepentingan (Lin, 2010). Untuk meminimalisir masalah keagenan, perlu ada pengawasan terhadap pengelolaan perbankan. Maka dari itu diperlukan *Good Corporate Governance* untuk memberikan petunjuk serta menjadi prinsip untuk melaraskan perbedaan kepentingan, terutama kepentingan terhadap pemegang saham dan manajer (El-Chaarani, 2014). Setelah meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi, diharapkan manager dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan *return* perbankan bank sehingga stabilitass perbankan dapat meningkat.

2.2.3 Kajian Keislaman

2.2.3.1 Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan dan stabilitas Bank dalam perspektif Islam

1. Al-Qur'an

Ayat Alquran-al A'raf ayat 85

تَقَافُوا أَلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. al-A'raf ayat 85)

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan sebuah bisnis atau ketika ber-muamalah hendaklah berperilaku adil dalam takaran dan timbangan serta jangan melakukan sesuatu yang dapat dapat merusak atau merugikan padahal Allah sudah memperbaikinya dan menentukannya dengan tarakaran yang paling benar.

Analisis rasio keuangan ini sangat penting bagi setiap perbankan, rasio keuangan berguna untuk pihak manajemen karena dapat melakukan pencegahan dan perbaikan untuk meminimalisir dari kondisi kegagalan. Jika perbankan memiliki stabilitas yang baik maka perbankan akan dianggap dalam keadaan yang sehat.

Pengambilan risiko yang tidak tepat atau tidak semestinya oleh bank akan membahayakan kesehatan dan keselamatan pada masing-masing lembaga keuangan dan stabilitas seluruh sektor keuangan ketika penularan akan menyebabkan risiko yang meluas ke lembaga keuangan lainnya (Huq et al., 2018).

2.2.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

a. Transparency

Transparansi dalam akuntansi biasa disebut dengan misdaqiyah yang memiliki arti yaitu seorang akuntan yang wajib memberi laporan serta memarpakan atau melampirkan neraca-neraca keuangan yang sesuai dengan real tanpa harus mempermainkan jumlah nominal yang ada di data.

Ketika memberikan keterangan-keterangan atau sebuah informasi yang ada harus disampaikan dengan yang sebenar-benarnya tanpa ada sebuah kebohongan atau kecurangan pada data, karena data-data akan menjadi kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Furqan:72 :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya”.

(Q.S Al-Furqan:72)

Dalam melakukan pembuatan neraca keuangan dan perhitungan akhir bersifat jujur, karena kejujuran dalam akuntan sangat penting agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam melampirkan data harus

mengungkapkan seluruh informasi data yang ada pada data perbankan dengan transparan.

b. Accountability

Dalam implikasi akuntansi dan bisnis yaitu dalam setiap individu yang terlibat wajib memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dilakukan atau diperbuat terhadap pihak-pihak yang terkait dari pertanggungjawaban yang biasanya berbentuk laporan keuangan.

Dalam hal ini dapat dipastikan pada bukti yang terdapat dalam Alquran Q.S Ibrahim ayat 41

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Artinya: “Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat).” Q.S Ibrahim ayat 41

Pada ayat Al-Quran diatas dijelaskan bahwa setiap orangtua memiliki peran dan tugas sebagai orangtua yang baik untuk anak-anaknya kelak beranjak dewasa yang akan menjadi sebuah tanggungjawab yang sangat besar yang semua itu akan diminta pertanggungjawaan oleh Allah Swt, hal ini sejalan dengan praktek manajemen di setiap perbankan semua Job Discription dari setiap pengurus harus bisa mempertanggungjawabkan setiap yang dilakukan dan bisa diterima dengan baik.

c. Responsibility

Perbankan harus memiliki sikap kehati-hatian dalam setiap mengambil sebuah keputusan dalam transaksi pembiayaan dan melakukan tanggung jawab

social. Dalam Islam dicontohnya wujud tanggungjawab yaitu tanggungjawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap orang yang memiliki modal (pemilik modal) dan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Hal ini dibuktikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” Q.S. Al-Isra:36

Pada ayat Al-Quran diatas dijelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban, dalam konteks ini Perbankan harus senantiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan untu menentukan kebijakan selanjutnya yang akan menjadi sebuah langkah dalam mengoperasikan sistem yang ada pada kineja sebuah Lembaga, baik dari kepatuhan dalam UU yang berlaku maupun dari aturan secara khusus yang diterapkan oleh kantor pusat, semua itu dilakukan untuk menghindari sebuah penyimpangan di dalam kinerja.

d. *Independency*

Selain mengambil sebuah keputusan harus berhati-hati, mengambil keputusan juga harus secara objektif dan tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dalam pengambilan sebuah keputusan stakeholder sebelumnya harus berdiskusi atau bermusyawarah terlebih dahulu kepada setiap masing-masing stakeholder yang berkepentingan dalam perbankan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan salah satu pihak.

Hal ini dibuktikan dengan bukti tersurat yang terdapat pada Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” Q.S Asy-Syura :38

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa setiap akan melakukan keputusan hendaklah berlaku adil dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain atau pihak manapun, penjelasan tersebut menjelaskan bahwa seluruh manusia harus patuh kepada seruan Tuhannya (Allah), maksudnya yaitu pengurus atau pimpinan didalam perbankan harus mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku bahwa pemimpin ketika memutuskan keputusan atau kebijakan harus secara independen yang berarti tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan memang tidak seharusnya terpengaruh oleh siapapun.

e. *Fairness*

Keadilan dalam akuntansi berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang menjadi faktor dominan. Hal ini sejalan dengan surah Al-Quran Asy-Syura ayat 182-183 Artinya: “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. Asy-Syura ayat 182-183

Ayat diatas menjelaskan pengertian dari keadilan yang sesuai dengan terjemahnya dari ayat diatas adalah perbankan sebagai lembaga penerimaan dana dan penyaluran dana harus bersifat seadil-adilnya dalam menyalurkan. Diharapkan jika selama kegiatan bertransaksi dilakukan secara seadil-adilnya maka akan berpengaruh terhadap stabilitas bank yang baik dan professional.

2.2.3.2 Manajemen resiko dan stabilitas perbankan dalam perspektif islam

Dalam Q.S Al-Luqman:34, Allah Swt memaparkan bahwa tidak ada satupun manusia yang akan menegetahui kejadian yang terjadi pada hari esok, maka dari itu Allah memerintah agar manusia melakukan sebuah perencanaan, manajemen dan perhitungan yang tepat dengan tujuan dapat menghadapi ketidakpastian dengan baik.

Adapun ayat Surah Al-Luqman ayat 34 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

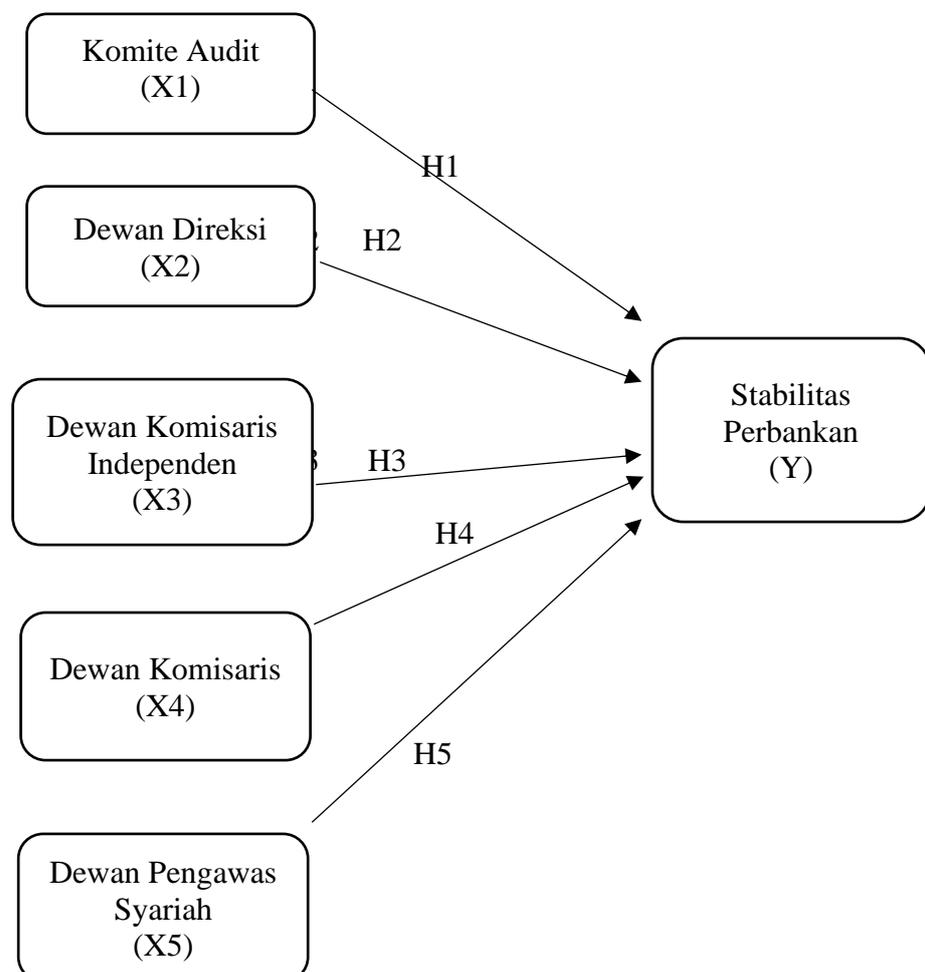
Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Luqman: 34)

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah SWT telah memberi peringkata kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada satupun umatNya yang bisa memprediksi atau mengetahui apa yang terjadi pada hari esok.

Dalam konteks ini, kondisi dimana semua akan menjadi teka-teki atau suatu ketidakpastiaan yang akan terjadi dihari esok dikatakan dengan resiko, maka dari itu sangat diperlukan adanya penngelolaan risiko yang krmungkinsn aksa terjadi dihari esok dengan tujuan unutm meminimalisir risiko yang besar dan mampu menghadapi resiko yang terjadi. Risiko memang tidak dapat diketahui kapan munculnya dan memang tidak mungkin dapat dihindari maka dari itu keberadaan risiko harus dilakukan dengan pengelolaan yang baik yang memungkinkan keberlangsungan kegiatan bisnis tetap terjaga.

2.3 Kerangka Konseptual

Tabel 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

X1= Variabel Independen pertama

X2= Variabel Independen kedua

X3= Variabel Independen ketiga

X4= Variabel Independen keempat

X5= Variabel Independen kelima

Y = Variabel Dependen

Sesuai dengan gambar yang diatas bahwa penelitian ini menggunakan variabel independen *good corporate governance* dengan empat indikator yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, dan Ukuran Dewan Komisaris Independen yang akan diuji terhadap variabel dependen stabilitas perbankan. Penggunaan proxy stabilitas bank sebagai variabel independen karena tidak banyak penelitian yang menggunakan stabilitas bank dengan *risk measure* atau pengendalian risiko namun demikian pengendalian risiko ini juga sebagai salah satu pengukuran untuk stabilitas bank. Kinerja secara definisinya bisa menambah profit, menjaga dan menambah asset dan juga mengendalikan resiko yang dapat meningkatkan stabilitas bank. Banyak yang melihat GCG dari asset dan profitabilitas padahal GCG juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan atau *risk measure*.

2.4 Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis**2.4.1 Hubungan Antar Variabel**

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan, maka didapat hubungan antar variabel dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

2.4.1.1 Hubungan Komite Audit terhadap Stabilitas Perbankan

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mengartikan bahwa komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara independen dan profesional yang memiliki tugas untuk memperkuat dan membantu fungsi dari dewan komisari (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas:

1. Pelaksanaan audit dan pelaporan keuangan

Dewan komisaris dan dewan komisaris memiliki tanggung jawab yang paling utama yaitu bertanggungjawab atas laporan keuangan dan auditor eksternal hanya memiliki tanggungjawab pada laporan keuangan eksternal saja, komite audit melakukan tugas pengawasan independen terhadap proses audit eksternal dan laporan keuangan.

2. Manajemen risiko dan control

Meskipun dewan komisaris dengan dewan direksi memiliki tanggung jawab utama bertanggung jawab atas manajemen control dan risiko, komite audit juga memberikan pengawasan independen atas proses control dan risiko.

3. Implementasi dari *corporate governance* di setiap perbankan Meskipun dewan komisaris dan direksi memiliki tanggung jawab utama bertanggung jawab atas *corporate governance*, komite audit juga melakukan pengawasan independen terhadap proses *corporate governance* (Effendi, 2017).

Komite audit adalah alat tata kelola perbankan yang penting untuk memantau aktivitas perbankan dan perlindungan nilai pemegang saham (Romano & Guerrini, 2012). Salah satu karakteristik dari komite audit adalah

independensi komite audit. Independensi merupakan dari karakteristik dari komite audit yang memang harus dimiliki untuk memenuhi proses pengawasannya terhadap manajemen perbankan yang mempunyai dampak yang baik maupun yang buruk terhadap kinerja bank (Yunina dan Nisa, 2019). Dengan kata lain jika diterapkan pada perbankan, semakin banyak jumlah komite audit maka bank akan semakin efisien dan menunjukkan stabilitas bank yang baik.

Penelitian (Indriyani dan Asytuti, 2019), (Fanta dkk, 2013) menyebutkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Sejalan dengan penelitian Arry Eksandy (2018) menyebutkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah dikarenakan kinerja yang kurang efektif karena rangkap jabatan yang dimiliki komite audit yang memiliki dampak kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perbankan melalui persaingan yang fair dan kurangnya pengawasan atas kegiatan manajemen. Mantan Keberadaan komite audit di dewan memiliki dampak yang merugikan pada profitabilitas bank. Ini karena beberapa bank baru-baru ini membentuk komite audit dan beberapa tidak memiliki sama sekali. Namun demikian, pengaruh negatif komite audit terhadap kinerja bank dapat dikaitkan dengan kurangnya keahlian anggota komite audit dalam membantu dewan dalam tata kelola bank, yang menyebabkan hanya peningkatan ukuran dewan dan honor dewan direksi.

Penelitian Mushtaq Younas, Umair Ahmmed dan Dr.Naveed (2018) menyebutkan bahwa Studi ini menemukan pengaruh signifikan keseluruhan dari struktur perbankan terhadap kinerja perbankan di Bank Islam Pakistan, India dan Banglades, karena tidak ada efek yang ditampilkan di Bangladesh. Naik komposisi hanya tidak signifikan dalam konteks India sementara independensi Dewan dan komite audit ditemukan tidak signifikan di Pakistan. Pengaruh keberadaan komite audit terhadap kinerja bank menunjukkan bahwa bank yang memiliki komite audit yang ditunjuk di dewan berkinerja lebih buruk daripada bank yang tidak memiliki komite audit.

Namun pada Penelitian (Yunina dan Nisa, 2019) menyebutkan bahwa jumlah dari anggota komite audit berpengaruh positif sebesar 6,4% terhadap kinerja keuangan BUS sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ada peningkatan jumlah anggota komite audit independen maka akan memiliki dampak yang baik untuk peningkatan stabilitas perbankan terhadap bank umum syariah. Dibentuknya Komite audit untuk mengoptimalkan kinerja dewan. Maka dari itu, komite audit menjadi peran penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Semakin banyak jumlah komite audit yang diisi oleh direksi independen, maka akan memberi dampak positif bagi perusahaan, yang mana akan semakin efektif dan kedudukan komite audit di dalam perbankan akan dapat meningkatkan transparansi perbankan tingkat kemungkinan dalam kecurangan akan semakin rendah.

2.4.1.2 Hubungan Dewan Direksi terhadap Stabilitas Perbankan

Dewan direksi menurut pasal 1 UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu organ perseroan yang memiliki wewenang serta tanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan tujuan dan maksud perseroan. Untuk menciptakan tata kelola perbankan yang efektif pada BUS maka pada setiap anggota dewan direksi harus mempunyai kompetensi teknis yang mendukung dan moral yang baik. Selain itu diharapkan juga mempunyai kesadaran yang penuh serta kesadaran yang tinggi terhadap berbagai risiko, dan mempunyai kemampuan dalam mengelola risiko yang ada pada bisnis perbankan. Dalam manajemen, Dewan direksi memiliki fungsi utama yaitu menentukan prinsip-prinsip dan tujuan strategis yang akan digunakan sebagai acuan operasional bank (Effendi, 2017). Dewan direksi akan menentukan suatu keputusan dan kebijakan yang akan diambil. Dewan direksi (*board of director*) memiliki fungsi untuk mengurus perusahaan.

Menurut penelitian (Indriyani dan Asytuti, 2019) menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Sejalan dengan penelitian penelitian Ashenafi Beyene Fanta, Kelifa Srmolo Kemal, dan Yodit Kassa Waka (2013) mengemukakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Efek merugikan dari ukuran dewan direksi pada kinerja bank mungkin karena fakta bahwa dewan dengan terlalu banyak direktur bisa menjadi tidak produktif, dengan komunikasi yang tidak efektif antar direksi di dewan. Di sisi lain, ukuran dewan direksi berdampak negatif terhadap profitabilitas bank, yang

menyiratkan bahwa semakin sedikit jumlah direktur di dewan, semakin baik pula keuntungan bank. Maka dari itu diutamakan jumlah direktur di dewan direksi dalam jumlah minimum, namun ukuran minimal itu akan memungkinkan pengurus untuk melakukan kegiatan pengawasannya dengan baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Eksandy, 2018) menemukan bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan alat *Return On Asset* (ROA). Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah dewan yang besar akan membawa keuntungan bagi perbankan dilihat dari sudut pandang *resource dependen* yaitu bahwa perbankan bergantung pada dewan agar pengelolaan sumberdayanya bisa dikelola dengan baik.

Maka dari itu, dewan direksi menjadi salah satu indikator yang penting dalam tata kelola perbankan, yang mana keberadaan dewan direksi akan menentukan stabilitas perbankan. Keefektifitasan dewan direksi akan memberikan hasil kinerja yang berbeda terhadap perbankan yang pengelolaannya baik dan sehat secara keuangan dibandingkan dengan perbankan yang memiliki masalah secara keuangan.

2.4.1.3 Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap Stabilitas Perbankan

Keberadaan dewan komisaris independen memiliki peranan penting pada implementasi tata kelola perbankan sehingga menurut peraturan CG diatur bahwa jumlah dari komisaris independen sepertiga dari jumlah komisaris pada dewan komisaris perbankan. pedoman CG Indonesia menyatakan aturan terkait

dengan ditetapkan dewan komisaris independen untuk memastikan mekanisme control dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjalan secara efektif dan efisien. Selain ditentukan jumlah dari dewan komisaris, dewan komisaris juga diminta untuk memiliki latar belakang dibidang keuangan atau akuntansi.

Dipaparkan Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan yang dipaparkan dalam Pasal 21 ayat 2 Peraturan OJK:

4. Dewan komisaris independen bukan dari orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menegndalikan memimpin dan mengawasi kegiatan emiten dalam waktu 6 bulann terakhir.
5. Dewan komisaris independen tidak boleh mempunyai saham.
6. Dewan komisaris independen tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, emiten dan anggota direksi.
7. Dewan komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan usaha dari kegiatan usaha emiten (Effendi, 2017).

Salah satu indikator dari *corporate governace* yaitu dewan komisaris independen, (Romano & Guerrini, 2012) mengintreprestasikan jika persentase direktur independen semakin tinggi, maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya penipuan keuangan dengan alasan yang lebih tinggi bobot relatif direktur independen yang akan memberi kepastian pengendalian yang lebih efektif. Saat ini sudah banyak negara telah memperkuat rekomendasi tentang komposisi dan independensi dewan.

Jika persentase direktur independen semakin tinggi, maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya penipuan keuangan dengan alasan yang lebih tinggi bobot relatif direktur independen yang akan memberi kepastian pengendalian yang lebih efektif (Romano & Guerrini, 2012). Saat ini sudah banyak negara telah memperkuat rekomendasi tentang komposisi dan independensi dewan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Dewi et al., 2018) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. dimana jika komisaris independen lebih besar akan membuat dewan komisaris dalam bertindak secara objektif serta berusaha dalam melindungi seluruh *stakeholder* perbankan.

Anggota dari Dewan komisaris independen memang tidak diizinkan berasal dari pemegang saham atau dewan direksi. Diketahui bahwa fungsi dari dewan komisaris independen yaitu sebagai pemisah kepentingan antara manajemen dengan pemilik perbankan. Proporsi dalam dewan komisaris akan berpengaruh atas fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan perbankan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka akan tinggi juga pengawasan terhadap perbankan. komisaris independen dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya kecurangan, dengan itu komisaris independen telah berfungsi sangat efektif untuk melindungi emiten dari berbagai risiko.

Dewan komisaris independen adalah bagian dari *corporate governance* yang berperan penting dalam menetapkan strategi dan mengontrol jalannya

suatu perbankan sehingga para menejer benar-benar memastikan stabilitas perbankan dan bagian dari pencapaian tujuan perbankan. Dewan komisaris independen mengambil peran yang cukup luas dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan perbankan sehingga sangat berdampak besar terhadap kebijakan dalam suatu pengambilan keputusan perbankan yang kemudian akan berpengaruh langsung kepada kebijakan kinerja keuangan perbankan (Dewi et al., 2018).

Namun penelitian (Eksandy, 2018) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang bukan dari orang yang berurusan langsung pada perbankan atau pegawai, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen diangkat karena memiliki beberapa pengalaman yang dianggap dapat bermanfaat terhadap perbankan tersebut. Dewan komisaris independen dapat mengawasi dewan komisaris dan mengawasi bagaimana aktivitas perbankan tersebut. Penelitian (Yunina dan Nisa, 2019) juga mengemukakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dari anggota dewan komisaris independen memberikan sebuah kerumitan tersendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris. terlebih karena dewan komisaris independen adalah utusan dari para pemegang saham, maka dari itu semakin banyak dewan komisaris independen maka akan berpengaruh negatif terhadap stabilitas perbankan.

2.4.1.4 Hubungan Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Perbankan

Dewan komisaris adalah organ perbankan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perbankan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat atau arahan kepada direksi dalam pengelolaan perbankan dengan iktikad yang baik, tanggungjawab dan kehati-hatian (Rusdiyanti dkk, 2019).

Tugas dewan komisaris yaitu mengawasi kinerja dan stabilitas bank dan memberi saran terhadap dewan direksi. Selain itu, dewan komisaris juga memiliki peranan dalam memonitor pelaksanaan tata kelola perbankan yang baik dan melakukan tindakan perubahan jika diperlukan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap kinerja dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan dan perilaku oportunistik manajemen, karena dewan komisaris mengawasi kinerja supaya bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan *return* (laba) (Tertius dan Yulius, 2015). Maka demikian, manajer akan berupaya dalam peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya perbankan agar mendapatkan laba yang lebih.

Menurut penelitian (Dewi et al., 2018) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Dewan komisaris bertugas melakukan pengontrolan dan memberikan arahan kepada dewan Direksi. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perbankan. Jumlah dewan komisaris yang dimiliki terlalu besar menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil harus didiskusikan terlebih dahulu dan mengasihkan kesepakatan dari

semua dewan komisaris. Selain itu keputusan tidak bersifat dinamis, karena untuk mengubah suatu keputusan yang telah disepakati, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berunding dan memproleh keputusan bersama. Dengan demikian efektifitas dalam pengambilan keputusan menjadi berkurang dan mengakibatkan penurunan stabilitas badan usaha.

Menurut penelitian (Shungu et al., 2014) mengemukakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perbankan, yaitu semakin besar ukuran dewan komisaris maka ada peningkatan terhadap kinerja keuangan perbankan karena adanya teori *resource dependency* yaitu besarnya jumlah dewan komisaris akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perbankan dan meningkatkan akses keberbagai sumber daya terhadap lingkungan eksternal.

Peranan Dewan Komisaris juga di harapkan dapat memberikan keuntungan dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi memonitor atas pelaporan keuangan. Ukuran jumlah dewan komisaris menunjang monitoring yang dilakukannya. Komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan berkualitas atau kemungkin terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Dengan kata lain bahwa prosentase komposisi dewan komisaris yang mempunyai anggota dari luar perbankan mempunyai kecenderungan mempengaruhi stabilitas perbankan yang dihasilkan (Dewi et al., 2018). Dengan adanya pengawasan yang sangat optimal dari dewan

komisaris itu akan menjadi bantuan dalam pengelolaan perbankan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.1.5 Hubungan Dewan Pengawas Syariah terhadap Stabilitas Perbankan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 3 mengemukakan bahwa Dewan pengawas Syariah yaitu anggota yang mempunyai suatu kompetensi yaitu yang mempunyai pengalaman serta pengetahuan pada Syariah muamalah, keuangan atau perbankan secara umum. Sedangkan reputasi bisa disebutkan sebagai rekam jejak anggota DPS dalam meningkatkan stabilitas perusahaan (Nugrehani, 2018).

Dewan pengawas Syariah mempunyai fungsi dalam melaksanakan, memastikan dan pengawasan terhadap setiap proses dan aktivitas perbankan agar tidak melanggar dari ketentuan syariat islam yang ditetapkan. Dalam pengawasan ini memiliki sebab karena adanya akad antar transaksi dari perbankan Syariah yang tidak sama dengan sistem yang ada diperbankan konvensional. Dalam menjamin bahwa DPS harus bekerja sesuai dengan tujuan maka DPS wajib membuat pelaporan berupa pernyataan secara berkala. Pernyataan DPS ini disampaikan didalam buku laporan tahunan atau annual report bank bersangkutan (Azizah dan Erinos, 2020).

Menurut penelitian Ekasari dan Deny (2019), mengemukakan bahwa pengawas syariah memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas perbankan. Didalam perbankan dewan pengawas Syariah (DPS) yang semakin besar akan menyebabkan mekanisme monitoring manajemen perbankan yang semakin

baik. Hasil penelitian dari Kholid dan Bactiar (2015) juga menyebutkan bahwa dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan mampu menurunkan masalah agensi yang dilakukan manajemen bank Syariah, sehingga jika masalah agensi mampu teratasi maka stabilitas bank Syariah akan menjadi lebih baik.

Dewan pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam perkembangan perbankan Syariah. fungsi utama dari DPS adalah mengarahkan, mengawasi dan meninjau kegiatan bank Syariah serta harus bisa memastikan bahwa bank Syariah telah beroperasi sesuai dengan syariat Islam. DPS memiliki wewenang yang diyakini bisa meningkatkan pengungkapan tanggung jawab social perbankan Syariah (Sutami dan Rustan, 2019).

2.4.2 Pengembangan Hipotesis

2.4.2.1 Hubungan komite audit terhadap Stabilitas Perbankan

Penelitian (Yuninadan Nisa, 2019) menemukan bahwa hasil positif dari komite audit terhadap kinerja keuangan. Menurut (Yuninadan Nisa, 2019) dengan adanya komite audit maka kinerja keuangan khususnya kinerja perbankan akan senantiasa terjaga. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan ini berpengaruh positif, pada penelitian ini menduga di Indonesia itu terjadi hal yang sama juga, karena dengan adanya komite audit akan menjaga stabilitas perbankan. Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini adalah positif.

H1= Komite audit berpengaruh positif terhadap stabilitas perbankan

2.4.2.2 Hubungan dewan direksi terhadap stabilitas perbankan

Penelitian (Eksandy, 2018) menemukan bahwa hasil Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan alat *Return*

On Asset (ROA). Berdasarkan pada penelitian ini menduga di Indonesia dengan banyaknya jumlah dewan yang besar akan membawa keuntungan bagi perbankan dilihat dari sudut pandang *resource dependen* yaitu bahwa perbankan bergantung pada dewan agar pengelolaan sumberdayanya bisa dikelola dengan baik. Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini adalah positif.

H2= Dewan direksi berpengaruh positif terhadap stabilitas perbankan

2.4.2.3 Hubungan dewan komisaris independen terhadap stabilitas perbankan

Penelitian (Dewi et al., 2018) menemukan bahwa hasil dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. dimana jika komisaris independen lebih besar akan membuat dewan komisaris dalam bertindak secara objektif serta berusaha dalam melindungi seluruh *stakeholder* perbankan. Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini adalah positif.

H3= dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap stabilitas perbankan

2.4.2.4 Hubungan dewan komisaris terhadap stabilitas perbankan

Penelitian (Shungu et al., 2014) menemukan hasil bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perbankan. yaitu semakin besar ukuran dewan komisaris maka ada peningkatan terhadap kinerja keuangan perbankan karena adanya teori *resource dependency* yaitu besarnya jumlah dewan komisaris akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perbankan dan meningkatkan akses keberbagai sumber daya terhadap lingkungan eksternal. Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini adalah positif.

H4= dewan komisaris berpengaruh positif terhadap stabilitas perbankan

2.4.2.5 Hubungan Dewan Pengawas Syariah terhadap Stabilitas Perbankan

Penelitian Ekasari dan Deny (2019), mengemukakan bahwa pengawas syariah memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas perbankan. Didalam perbankan dewan pengawas Syariah (DPS) yang semakin besar akan menyebabkan mekanisme monitoring manajemen perbankan yang semakin baik. Hasil penelitian dari Kholid dan Bactiar (2015) juga menyebutkan bahwa dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan mampu menurunkan masalah agensi yang dilakukan manajemen bank Syariah, sehingga jika masalah agensi mampu teratasi maka stabilitas bank Syariah akan menjadi lebih baik.

H5= Dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap stabilitas perbankan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian kausal adalah hubungan yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara sebab dan akibat dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2016). Hubungan sebab akibat mengintreprestasikan apakah penyebab langsung mendahului efek atau apakah sebab dan akibat dapat terjadi hampir bersamaan, yang akan membuatnya mustahil untuk dibedakan (Yin, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap stabilitas bank. Dimana Variabel dari *Good Corporate Governance* yang juga merupakan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah. penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan *Good Corporate Governance* dan laporan keuangan bank Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2017.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data *timeseries* dan *cross section* mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Dari data penelitian dalam rentang waktu 8 tahun terakhir dipandang

cukup untuk mewakili kondisi dari Bank Umum Syariah di Indonesia dengan indikator stabilitas perbankan Syariah pada periode tersebut.

3.2 Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia. Menurut statistic perbankan Syariah (www.ojk.go.id) pada tahun 2020 saat ini Bank Umum Syariah berjumlah 14 BUS di Indonesia, maka dari itu besarnya populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 14 Bank Umum Syariah.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana metode tersebut adalah metode dengan Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan sesuatu (Sugiyono, 2016). *Purposive sampling* memiliki banyak varian. Setiap varian tergantung tujuan yang berbeda untuk memilih sampel (Yin, 2016). Pada penelitian ini yang akan terpilih menjadi sampel yaitu perbankan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perbankan Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010 hingga 2017.
2. Perbankan Umum Syariah yang memiliki *annual report* pada tahun 2010 sampai dengan 2017.
3. Perbankan Umum Syariah yang memiliki laporan *Good Corporate Governance* v pada tahun 2010 hingga 2017.

Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, maka sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 6 Bank Umum Syariah

karena dari 14 BUS di Indonesia hanya ada 6 BUS yang memenuhi kriteria yaitu antara lain Bank BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, MEGA Syariah, BUKOPIN Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data laporan keuangan diperoleh data web resmi setiap bank umum Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti mengidentifikasi masalah penelitian berdasarkan tren di lapangan atau kebutuhan untuk menjelaskan mengapa sesuatu bisa terjadi. Dalam pengumpulan data kuantitatif, menggunakan instrumen untuk mengukur variabel pembelajaran (Creswell, 2012).

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yaitu empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen dari penelitian ini yaitu Dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independent, komite audit dan dewan pengawas syariah. Variabel dependen penelitian ini yaitu stabilitas bank yang diukur dengan Z-Score.

No	Variabel	Rumus	Type Data
1	Stabilitas Perbankan	$Z = \text{Log} \left(\frac{ROA + EQTTA}{\sigma(ROA)} \right)$ (Huq et al., 2018)	Rasio
2	Komite Audit	Jumlah Anggota Komite Audit yang ada di perbankan (Eksandy, 2018)	Nominal
3	Dewan Direksi	Jumlah Anggota Dewan Direksi yang ada di perbankan	Nominal

		(Eksandy, 2018)	
4	Dewan Komisaris	Jumlah Anggota Dewan Komisaris yang ada di perbankan (Chariri dan Addiyah, 2014)	Nominal
5	Dewan Komisaris Independen	$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{jumlah Komisaris}}$ (Eksandy, 2018)	Rasio
6	Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada di perbankan (Eksandy, 2018)	Nominal

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan dari data silang (*cross section*) dan runtun waktu (*time series*) (Cakara, 2017). Menurut (Creswell, 2012) data panel adalah desain survei longitudinal (membandingkan perubahan subjek penelitian pada waktu tertentu). Survei longitudinal dapat menilai perubahan seiring waktu dengan tren populasi, perubahan dalam kelompok atau sub populasi dari suatu populasi atau perubahan dalam panel individu yang sama dari waktu ke waktu Data panel adalah prosedur penelitian yang mempelajari sampel yang sama pada lebih dari satu kesempatan (Sarantakos, 2013) .

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Stabilitas perbankan yang diproksikan dengan Z-Score. Sedangkan variable independennya yaitu *Good Corporate Governance* yang diproksikan melalui komite audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris

Independen dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis dari variabel-variabel yang telah disebutkan, maka rumus persamaan regresi pada penelitian ini yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 DK_{it} + \beta_2 DD_{it} + \beta_3 KA_{it} + \beta_4 DKI_{it} + \beta_5 DPS_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y = Stabilitas Perbankan
- β = Konstanta
- DK = Dewan Komisaris
- DD = Dewan Direksi
- KA = Komite Audit
- DKI = Dewan Komisaris Independen
- DPS = Dewan Pengawas Syariah
- I = Sampel
- T = Tahun
- ϵ = Komponen error

1. *Estimasi Model Data Panel*

a. *Metode Common Effect (CEM)*

Pada metode ini menggabungkan semua data tanpa memperhatikan tempat dan waktu penelitian. Diasumsikan bahwa sifat antar unit *cross section* dalam berbagai kurun waktu (Rahmadeni & Wulandari, 2017). Adapun persamaan Regresi Data panel dengan Menggunakan Pendekatan *Common Effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

b. Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Pada penelitian ini mengansumsikan jika setiap antar unit waktu maupun antar unit sektor memberikan dampak yang beda pada setiap model. Dampak yang berbeda tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien intersep, sehingga Metode *Fixed Effect Model* (FEM) akan mempunyai intersep yang berbeda-beda (Falah dkk, 2016).
Persamaan regresi pada *fixes effect model* sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 D1i + \alpha_2 D2i + \dots + \alpha_9 D9i + \beta_1 X1it + \dots + \beta_5 X5it + e_{it}$$

c. Metode *Random Effect Model* (REM)

Metode *Random Effect Model* (REM) mengansumsikan bahwa estimasi *random effect model* bahwa efek individu bersifat bebas (*random*) bagi semua *unit cross section* (Rahmadeni & Wulandari, 2017). Pada metode ini terdapat efek waktu maupun efek sektor yang dimasukkan pada komponen residual model REM.
Persamaan regresi REM adalah sebagai berikut: $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1it + \beta_2 X2it + (e_{it} + \mu_i)$

2. Tahap Analisis Data

Dalam pemilihan model yang paling tepat dalam pengolahan data panel serta agar dugaan didapat secara efisien, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu:

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan dalam pemilihan dua model yaitu *Model Fixed Effect* dan *Model Common Effect*. Asumsi bahwa setiap unit *cross section* mempunyai sifat yang mirip cenderung tidak realistis karena perlu diingat kemungkinan bahwa setiap unit *cross section* mempunyai sifat yang berbeda menjadi dasar dari uji Chow. Pada pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut:

$H_0 = \text{Model Common Effect}$

$H_1 = \text{Model Fixed Effect}$

Statistic uji *Chow* mengikuti sebaran F-Statistic yaitu F. Penolakan untuk H_0 dapat dibuktikan dengan nilai dari uji *Chow* lebih besar dari F-tabel dan sebaliknya.

Dimana F tabel didapat dengan rumus sebagai berikut:

$F\text{-tabel} = (N-1, NT-N-K); \alpha$

b. Uji LM (Lagrange Multiplier)

Uji LM merupakan sebuah uji yang digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *random effect* yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji LM dikembangkan oleh Breusch-Pagan, yang mana pengujian signifikansi model *random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode *common effect* (OLS). Adapun hipotesis dalam uji LM adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Model Common Effect}$

$H_a = \text{Model Random Effect}$

Jika nilai probabilitas (p-value) > level of significant (5%), maka H₀ diterima. Sebaliknya, jika nilai probabilitas (p-value) < level of significant (5%), maka H_a diterima.

c. Uji hausman (*Hausman Test*)

Pengujian dengan hausman test ini karena menjadi dasar pada model fixed effect model yang mengandung unsur trade yaitu hilangnya unsur bebas dengan memasukkan variabel dummy dan model random effect yang harus melihat dan memperhatikan atas ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Uji hausman ini biasanya digunakan pada perbandingan model *random effect* dengan model *fixed effect*. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesisi sebagai berikut:

$$H_0 = \text{corr}(X_{it}, U_{it}) = 0 \text{ (Model Random Effect)}$$

$$H_1 = \text{corr}(X_{it}, U_{it}) \neq 0 \text{ (Model Fixed Effect)}$$

Statistic hausman menyebar *Chi-Square*, Penolakan untuk H₀ dapat dibuktikan jika nilai X^2 menghasilkan pengujian lebih besar dari $X^2_{(k, \alpha)}$ dimana K adalah jumlah dari variabel independen atau P-Value lebih kecil dari α (Caraka, 2017).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji otokorelasi agar bisa mendapatkan hasil estimasi yang valid yang memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai berikut (Sanusi, 2014):

a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai probabilitas lebih dari $\alpha = 0,05$ maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Correlation* dari hasil analisis regresi. Jika nilai *Correlation* > 10 maka terdapat gejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin Watson . hasil perhitungan Durbin-Watson (*d*) dibandingkan dengan nilai *d_{tabel}* pada $\alpha = 0,05$.

d. Uji heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan metode Glesjer. Apabila masing masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji T dilakukan untuk melihat seberapa signifikan pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Eksandy, 2018). Uji t yaitu suatu langkah yang mana hasil sampel bisa digunakan dalam verifikasi kesalahan atau kebenaran hipotesis nul (H_0).

Pengambilan keputusan dalam menolak atau menerima H_0 berdasarkan nilai uji statistic yang didapat dari data. Dalam hipotesis penelitian terdapat hal penting yang memakai data sampel dengan menggunakan uji t yaitu masalah memilih dalam penggunaan satu sisi atau dua sisi.

Berikut prosedur uji t dengan uji satu sisi sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_1 : \beta_1 < 0$$

2. Mencari nilai t kritis dan menghitung nilai statistic t (t-hitung) dari tabel distribusi t pada α dan *degree of freedom*.

3. Menentukan kriteria keputusan t-tabel

- a. Jika nilai t hitung $>$ nilai t kritis maka menerima H_a dan H_0 ditolak.
- b. Jika nilai t hitung $<$ nilai t kritis maka menolak H_a dan H_0 diterima.

Jika menolak H_a dan H_0 diterima artinya bahwa secara statistic variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, jika Jika menerima H_a dan H_0 ditolak artinya bahwa secara statistic variabel bebas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya,

4. Menentukan derajat kepercayaan

Tingkat kepercayaan adalah 95% atau dengan nilai $\alpha = 0,05$ (Widarjono, 2015).

- b. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan dalam mengetahui seberapa besar kemampuan dari model dalam menerangkan variabel bebas (dependen) terhadap variabel terikat (independen) (Eksandy, 2018).

1. Nilai R^2 merupakan suatu ukuran sebuah garis regresi yang menunjukkan baik jika R^2 nya tinggi dan sebaliknya. Apabila nilai R^2 rendah maka memiliki garis regresi yang kurang baik.
2. Nilai Koefisien terletak antara $0 \leq R^2 \leq 1$

Jika R^2 mendekati angka satu maka akan memberikan hamper semua informasi yang diinginkan dalam memprediksi variasi variabel dependen, namun jika nilai R^2 yang mendekati angka nol yang berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Widarjono, 2015).

Formula dari Koefisien Determinasi (R^2) sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}$$

Keterangan:

ESS = *Explained sum of square*

RSS = *Residual sum of square*

$(\hat{Y}_i - \bar{Y})$ = variasi prediksi Y (= \hat{Y}_i) terhadap nilai rata-ratanya atau variasi garis regresi dari nilai rata-ratanya dan total dari penjumlahan kuadrat nilai.

$(Y_i - \bar{Y})$ = variasi didalam Y dari nilai rata-ratanya dan total dari penjumlahan kuadrat nilai.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sistem keuangan dan perbankan ganda dalam penerapannya mulai memiliki arah ketika adanya pemberlakuan Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998, sehingga banyak Lembaga keuangan Syariah yang beroperasi secara berdampingan dengan Lembaga keuangan konvensional. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/8/PBI/2004, bank Syariah merupakan bank yang dapat beroperasi berdasarkan dengan prinsip Syariah Islam, termasuk juga Unit Usaha Syariah serta kantor-kantor yang beroperasi berdasarkan syariat Islam (**Putra dan Nafik, 2017**).

Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia atau di OJK pada tahun 2010-2019. Saat ini terdapat 14 Bank umum Syariah, namun setelah dilakukan *purposive sampling* hanya memperoleh 6 bank umum Syariah yang telah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui web resmi setiap bank umum Syariah dan juga melalui OJK. Berikut ini akan dipaparkan 6 bank umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan yang telah terpilih menjadi sampel pada penelitian ini.

Tabel 4.1

Daftar Objek Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Bca Syariah
2	PT. Bank Syariah Mega Indonesia
3	PT. Bank Bukopin Syariah
4	PT. Bank BRI Syariah
5	PT. Bank Bni Syariah
6	Bank Mandiri Syariah

Sesuai dengan Tabel diatas dengan hasil *purposive sampling*, data penelitian yang didapat yaitu selama 8 tahun dengan 6 objek pengamatan adalah sebanyak 48 sampel. Sampel yang telah diperoleh akan diuji untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari *good corporate governance* terhadap stabilitas perbankan di bank umum Syariah.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deksripsi memiliki tujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud untuk memberikan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis deskriptif ini hanya meberikan akumulasi pada data dasar dalam bentuk deskripsi semata yang arinya bahwa tidak memberi keterangan saling memiliki hubungan, membuat ramahlan, menguji hipotesisi atau melakukan

penarikan kesimpulan (Marhamah dkk, 2012). Adapun hasil dari statistik deskriptif pada penelitian ini akan dipaparkan dalam Tabel 4.2 sebagai Berikut:

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

No	Variabel	Min.	Max.	Mean.	Median.
1	Stabilitas Bank	0.824121	1.525468	1.133491	1.162922
2	Komite Audit	0.693147	1.945910	1.290124	1.098612
3	Dewan Direksi	1.098612	1.945910	1.396518	1.386294
4	Dewan Komisaris Independen	0.693147	1.098612	0.769172	0.693147
5	Dewan Komisaris	1.098612	1.609438	1.299584	1.386294
6	Dewa Pengawas Syariah	0.693147	1.098612	0.836749	0.693147

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Adapun Interpretasi dari Tabel 4.2 sebagai berikut:

1. Stabilitas Bank

Variabel stabilitas bank dalam penelitian ini mempunyai nilai minimum sebesar 0.824121 dan nilai maksimum senilai 1.525468. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel dari stabilitas bank yang diambil pada penelitian ini memiliki kisaran 0.824121 sampai dengan 1.525468 dengan rata-rata 1.133491 dan median senilai 1.162922. Berdasarkan data dari 6 Bank Umum Syariah yang diteliti selama 8 tahun berturut-turut, dapat diketahui bahwasanya bank umum Syariah yang memiliki stabilitas bank minimum yaitu PT. Bukopin Syariah pada tahun 2010 sedangkan nilai

stabilitas bank maksimum dimiliki oleh PT. Bank Mandiri Syariah pada tahun 2010.

2. Komite Audit

Dalam penelitian ini Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 0.693147 dan nilai maksimum sebesar 1.945910. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel dari stabilitas bank yang diambil pada penelitian ini memiliki kisaran 0.693147 sampai dengan 1.945910 dengan rata-rata 1.290124 dan median senilai 1.098612. Berdasarkan data dari 6 Bank Umum Syariah yang diteliti selama 8 tahun berturut-turut, dapat diketahui bahwasanya bank umum Syariah yang memiliki komite audit minimum yaitu PT. Bank Bukopin pada tahun 2012-2014 sedangkan nilai komite audit yang memiliki komite audit maksimum yaitu PT. Bank Mandiri Syariah pada tahun 2016 dan 2017.

3. Dewan Direksi

Dalam penelitian ini Variabel Dewan Direksi memiliki nilai minimum sebesar 1.098612 dan nilai maksimum sebesar 1.945910. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel dari stabilitas bank yang diambil pada penelitian ini memiliki kisaran 1.098612 sampai dengan 1.945910 dengan rata-rata 1.396518 dan median senilai 1.386294. Berdasarkan data dari 6 Bank Umum Syariah yang diteliti selama 8 tahun berturut-turut, dapat diketahui bahwasanya bank umum Syariah yang memiliki Dewan Direksi minimum yaitu PT. BCA Syariah pada tahun 2010-2017, PT. Mega Syariah pada tahun 2016-2017, dan PT. BNI Syariah pada tahun 2011-2012, sedangkan nilai

komite audit maksimum dimiliki oleh PT. Bank Mandiri Syariah pada tahun 2017.

4. Dewan Komisaris Independen

Dalam penelitian ini Variabel Dewan Komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 0.693147 dan nilai maksimum sebesar 1.098612. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel dari stabilitas bank yang diambil pada penelitian ini memiliki kisaran 0.693147 sampai dengan 1.098612 dengan rata-rata 0.749912 dan median senilai 0.693147. Berdasarkan data dari 6 Bank Umum Syariah yang diteliti selama 8 tahun berturut-turut, dapat diketahui bahwasanya bank umum Syariah yang memiliki Dewan Komisaris Independen minimum yaitu PT. Bank BCA Syariah pada tahun 2010 -2017, Pt Bank Mega Syariah pada Thun 2010-2017, PT. Bank Bukopin pada tahun 2010-2017, PT. dan PT.Bank BNI Syariah pada tahun 2010-2017, sedangkan nilai Dewan Komisaris Independen maksimum dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah pada tahun 2010-2017.

5. Dewan Komisaris

Dalam penelitian ini Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai minimum sebesar 1.098612 dan nilai maksimum sebesar 1.609438. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel dari stabilitas bank yang diambil pada penelitian ini memiliki kisaran 1.098612 sampai dengan 1.609438 dengan rata-rata 1.248798 dan median senilai 1.098612. Berdasarkan data dari 6 Bank Umum Syariah yang diteliti selama 8 tahun berturut-turut, dapat diketahui bahwasanya bank umum Syariah yang memiliki Dewan Komisaris minimum

yaitu PT. Bank BCA Syariah pada tahun 2010-2017, PT. Bank Mega Syariah pada tahun 2010-2017, dan PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2010,2011 dan 2014, sedangkan nilai Dewan Komisaris maksimum dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah pada tahun 2013-2016.

6. Dewan Pengawas Syariah

Dalam penelitian ini Variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum sebesar 0.693147 dan nilai maksimum sebesar 1.098612. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel dari stabilitas bank yang diambil pada penelitian ini memiliki kisaran 0.693147 sampai dengan 1.098612 dengan rata-rata 0.836749 dan median senilai 0.693147. Berdasarkan data dari 6 Bank Umum Syariah yang diteliti selama 8 tahun berturut-turut, dapat diketahui bahwasanya bank umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah minimum yaitu PT. BCA Syariah pada tahun 2010-2017, PT. Bank Bukopin 2010-2017, sedangkan nilai Dewan Pengawas Syariah maksimum dimiliki oleh PT. Bank Mega Syariah pada tahun 2010-2017.

4.2.2 Pemilihan Model dalam Data Panel

Dalam regresi data panel, beberapa model estimasi dalam suatu penelitian dapat ditentukan dengan cara melakukan beberapa uji.

Adapun beberapa uji tersebut sebagai berikut:

4.2.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan dalam pemilihan dua model yaitu *Model Fixed Effect* dan *Model Common Effect*.

$H_0 = \text{Model Common Effect}$

$H_1 = Model\ Fixed\ Effect$

Dalam Uji Chow kriteria pengujian yaitu jika nilai Cross Section Chi-Square $<$ level of signifikan ($\alpha = 5\%$), maka H_1 diterima dan sebaliknya jika nilai Cross Section Chi-Square $>$ level of signifikan ($\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima. Berikut hasil dari uji chow pada penelitian ini adalah:

Tabel 4.3

Hasil Uji Chow

Effects Test	Prob.
Cross Section Chi-Square	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10, 2021

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan oleh Tabel 4.3, diketahui bahwa nilai dari $prob = 0.0000$ untuk cross section, yang berarti bahwa nilai Cross Section Chi-Square lebih kecil dari 0.05. Hasil yang telah diperoleh menguatkan dugaan bahwa model terbaik yaitu menggunakan *fixed effect* model. Hasil uji chow yang signifikan dilanjutkan dengan uji hausman yang akan memilih metode *random effect* atau *fixed effect* model.

4.2.2.2 Uji Hausman

Uji hausman ini biasanya digunakan pada perbandingan model *random effect* dengan model *fixed effect*. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Model *Random Effect*

H_1 = Model *Fixed Effect*

Tabel 4.4

Uji Hausman

	Prob
Cross-Section random	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10, 2021

Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh pada pengujian Tabel 4.4, diketahui bahwa nilai dari *cross-section* Chi-Square sebesar 0.0000. Hasil tersebut memaparkan bahwa nilai *cross-section* Chi-Square < level of signifikan ($\alpha = 5\%$) atau $0.0000 < 5\%$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, maka model estimasi regresi data panel yang terbaik terkait pengaruh komite audit, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan dewan komisaris terhadap stabilitas perbankan umum Syariah berdasarkan uji hausman adalah *fixed effect model*.

4.2.3 Model Terbaik dalam Penelitian

Berdasarkan hasil dari kedua pengujian yang telah dilakukan dengan uji chow dan uji hausman, model yang terpilih sebagai model terbaik yaitu model *fixed effect model* (FEM). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap stabilitas bank umum Syariah berdasarkan uji hausman adalah *fixed effect model* (FEM).

Tabel 4.5

Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.023525	0.267229	3.830134	0.0005
Komite Audit (KA)	0.157658	0.071693	2.199059	0.0342
Dewan Direksi (DD)	-0.413144	0.089041	-4.639914	0.0000
Dewan Komisaris Independen (DKI)	-0.157823	0.121474	-1.299234	0.2019
Dewan Komisaris (DK)	0.159003	0.121187	1.312047	0.1976
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	0.475992	0.199085	2.390905	0.0220
F-Statistic= 25.03035 R-Square= 0.871216 Adj.R-Square= 0.836410				

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.5, maka model persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Stabilitas Bank =

$$1.023525 + 0.157658 KA - 0.413144 DD - 0.157823 DKI + 0.159003 DK + 0.475992 DPS$$

Adapun Intrepetasi model dari persamaan diatas adalah

a. Komite Audit

Komite Audit menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan. Artinya, terjadi peningkatan Komite Audit sebesar 1 satuan akan meningkatkan komite audit sebesar 1.023525.

b. Dewan Direksi (DD)

Dewan Direksi menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan. Artinya, terjadi peningkatan Dewan Direksi sebesar 1 satuan akan menurunkan Dewan Direksi sebesar -0.413144.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan. Artinya, terjadi peningkatan Komite Audit sebesar 1 satuan akan meningkatkan komite audit sebesar 0.475992.

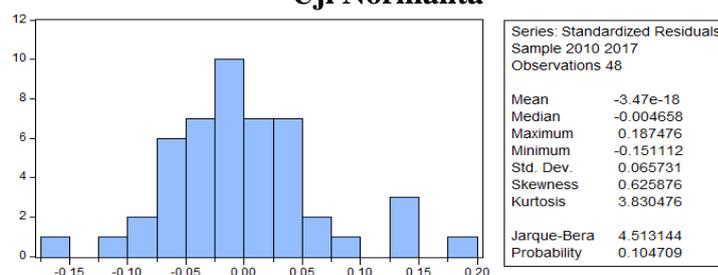
Interpretasi model persamaan dalam penelitian ini hanya dilakukan untuk variabel 3 variabel independen saja. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini ada tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah yang diprosikan dengan Z-Score, karena variabel yang tidak signifikan hanya memberikan pengaruh yang kecil, sehingga tidak perlu diinterpretasikan.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai probabilitas lebih dari $\alpha = 0,05$ maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.6
Uji Normalita



Sumber: Data diolah dengan Eviews 10, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai probability sebesar 0.104709. hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probability > nilai signifikan ($\alpha=5\%$), dengan kata lain $0.104709 > \alpha=5\%$). Sehingga distribusi data pada model regresi pengaruh *good corporate governance* terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diprosikan dengan *z-score* dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.4.2 Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *correlation* dari hasil analisis regresi. Jika nilai *correlation* > 0.90 maka terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas

	Y_Stabilitas Bank	X1_Komite Audit	X2_Dewan Direksi	X3_Dewan Komisrais Independen	X4_Dewan Komisaris	X5_Dewan Pengawas Syariah
Y_Stabilitas Bank	1.000000	0.266155	0.248033	0.267143	0.017396	0.257663
X1_Komite Audit	0.266155	1.000000	0.435222	0.338883	0.614019	0.154113
X2_Dewan Direksi	0.248033	0.435222	1.000000	0.190112	0.590179	0.544975
X3_Dewan Komisrais Independen	0.267143	0.338883	0.190112	1.000000	0.484980	0.020926
X4_Dewan Komisaris	0.017396	0.614019	0.590179	0.484980	1.000000	0.153347
X5_Dewan Pengawas Syariah	0.257663	0.154113	0.544975	0.020926	0.153347	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.7, diketahui bahwa nilai correlation sebesar $0.257663 < 0.90$. Artinya bahwa data

pada model regresi pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diprosikan dengan z-score dinyatakan memenuhi asumsi multikolinearitas.

4.2.4.3 Uji autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan menggunakan Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test pada Eviews. Jika nilai prob Chi-Square (Obs*R-Square) > 0.05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Selanjutnya pengujian autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Test	Prob. Chi-Square
Breush-Godfrey	0.1839

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10, 2021

Hasil uji Autokorelasi yang disajikan pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai prob Chi-Square sebesar 0.1839 lebih besar dari 0.05 oleh karena itu hasil uji Autokorelasi menunjukkan bahwa data tidak mengalami masalah autokorelasi.

Sehingga distribusi data pada model pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap stabilitas bank umum syariah di

Indonesia yang diproksikan dengan *z-score* dinyatakan memenuhi asumsi autokorelasi.

4.2.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Heteroskedastisitas Test: White pada Eviews. Jika nilai prob Chi-Square ($\text{Obs} \times \text{R-Square}$) > 0.05, maka tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas. Selanjutnya pengujian Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9

Uji Heteroskedastisitas

Test	Prob Chi-Square
Breusch-Pagan-Godfrey	0.5996

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10, 2021

Hasil uji Heteroskedastisitas yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai prob Chi-Square sebesar 0.5996 lebih besar dari 0.05 oleh karena itu hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data tidak mengalami masalah Heteroskedastisitas.

Sehingga distribusi data pada model pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diproksikan dengan *z-score* dinyatakan memenuhi asumsi Heteroskedastisitas.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji Parsial

Uji T dilakukan untuk melihat seberapa signifikan pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Eksandy, 2018). Uji parsial dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} membandingkan nilai p_value dengan level of signifikan ($\alpha=10\%$). Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p_value < \text{level of significance } (\alpha=10\%)$, maka dewan direksi, komite audit, dewan komisaris independen, dan dewan komisaris secara parsial (individual) memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah yang diprosikan dengan Z-Score.

a. Pengaruh Komite Audit terhadap stabilitas perbankan

Pengujian hipotesis secara parsial Komite Audit terhadap stabilitas perbankan menghasilkan nilai probabilitas $0.0342 < 0.10$. Artinya, ada pengaruh positif signifikan secara parsial komite audit terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diprosikan dengan Z-Score. Dengan kata lain H_1 diterima.

b. Pengaruh Dewan Direksi terhadap stabilitas perbankan

Pengujian hipotesis secara parsial dewan direksi terhadap stabilitas perbankan menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.10$. Artinya bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dewan direksi terhadap stabilitas bank umum syariah di

Indonesia yang diproksikan dengan Z-Score. Dengan kata lain H_2 diterima.

- c. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap stabilitas perbankan

Pengujian hipotesisi secara parsial dewan komisaris independen terhadap stabilitas perbankan menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.2019 > 0.10$. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial Dewan Komisaris Independen terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Z-Score. Dengan kata lain H_3 ditolak.

- d. Pengaruh Dewan komisaris terhadap stabilitas perbankan

Pengujian hipotesis secara parsial dewan komisaris terhadap stabilitas perbankan menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.1976 > 0.10$. Artinya bahwa tidak ada pengaruh positif signifikan secara parsial Dewan komisaris terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Z-Score. Dengan kata lain H_4 diterima.

- e. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap stabilitas perbankan

Pengujian hipotesis secara parsial dewan pengawas syariah terhadap stabilitas perbankan menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.0220 < 0.10$. Artinya bahwa ada pengaruh positif signifikan secara parsial Dewan komisaris terhadap stabilitas bank

umum syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Z-Score. Dengan kata lain H_5 diterima.

4.2.5.2 Uji Simultan

Uji Simultan (uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen dan dewan komisaris secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan Z-score.

Uji simultan dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} atau membandingkan p-value dengan level of significance ($\alpha=5\%$). Berdasarkan hasil uji Simultan Nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 yang artinya bahwa nilai probabilitas F-statistic kurang dari 0.05 yang berarti signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan komisaris dan dewan pengawas Syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah.

4.2.5.3 Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan dalam mengetahui seberapa besar kemampuan dari model dalam menerangkan variabel bebas (dependen) terhadap variabel terikat (independen) (Eksandy, 2018). Berdasarkan hasil Uji Determinasi Nilai dari R-Square Adjusted R-Square sebesar 0.87 atau 87% yang berarti bahwa variabel stabilitas

bank dapat dijelaskan oleh komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah sebesar 87%, sedangkan sisanya (100%-87%) dijelaskan oleh variabel diluar model.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan komisaris Independen, dan Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah secara Simultan

Berdasarkan hasil dari uji simultan yang telah dilakukan menggunakan software Eviews 10.0, menunjukkan bahwa Nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 yang artinya bahwa nilai probabilitas F-statistic kurang dari 0.05 yang berarti signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunina dan Nisa (2019) dengan variabel independen yaitu komite audit dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan antara komite audit dan dewan komisaris terhadap stabilitas bank umum Syariah. selain itu, penelitian oleh Eksandy (2018) juga memaparkan hasil bahwa variabel independen (dewan direksi, dewan pengawas Syariah, dewan komisaris independen dan

komite audit) memiliki pengaruh secara simultan berpengaruh terhadap stabilitas bank umum Syariah.

4.3.2. Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan komisaris Independen, dan Dewan Komisaris terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah secara Parsial

4.3.2.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menggunakan software Eviews 10.0, variabel komite audit menunjukkan t-statistik 1.737030 dengan probabilitas 0.0899. Probabilitas hasil uji parsial tersebut masih lebih kecil dari pada tingkat probabilitas yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 1%, 5% dan 10%. Artinya variabel komite audit (KA) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel stabilitas bank umum syariah dengan nilai koefisien sebesar 0.126593. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap stabilitas bank.

Komite audit diukur dengan indikator penjumlahan seluruh anggota komite audit yang berada di dalam setiap perbankan. Kualitas komite audit bisa diproksikan dengan karakteristik komite audit antara lain meliputi kompetensi keuangan/akuntansi, independensi dan ukuran komite audit yang

dapat memberikan gambaran kualitas yang dimiliki oleh suatu komite audit di setiap perbankan.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian (Yunina dan Nisa, 2019) menyebutkan bahwa jumlah dari anggota komite audit berpengaruh positif terhadap stabilitas bank umum syariah sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ada peningkatan jumlah anggota komite audit maka akan memiliki dampak yang baik untuk peningkatan stabilitas bank umum syariah. Dibentuknya Komite audit untuk mengoptimalkan kinerja dewan. Maka dari itu, komite audit menjadi peran penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Tata kelola perbankan yang baik akan berdampak pada peningkatan stabilitas bank. Tata kelola perbankan yang baik ditandai dengan sistem pengawasan yang baik mampu meminimalisir terjadinya berbagai kecurangan dalam perbankan tersebut, khususnya pada pelaporan keuangan perbankan sehingga stabilitas bank dapat dipertahankan (Mulyani, 2020).

Komite audit adalah alat tata kelola perbankan yang penting untuk memantau aktivitas perbankan dan perlindungan nilai pemegang saham (Romano & Guerrini, 2012). Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mengartikan bahwa komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara independen dan profesional yang memiliki

tugas untuk memperkuat dan membantu fungsi dari dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Komite audit menjadi salah satu yang memiliki peran penting disetiap perbankan yang dikarenakan pengawasan komite audit mampu mempengaruhi stabilitas bank. Semakin besar jumlah anggota komite audit yang berada didalam suatu perbankan maka akan memberikan *protection* dan *control* yang lebih baik terhadap proses keuangan dan akuntansi sehingga mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap stabilitas perbankan (Anderson et al., 2004).

Komite audit memiliki tugas utama yaitu mendorong diterapkannya tata kelola perbankan yang baik, meningkatkan transparansi, terbentuknya anggota pengendalian internal yang memadai dan pelaporan keuangan serta kemandirian, ketepatan dan objektivitas akuntan publik. Berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 menyebutkan bahwa dalam anggota komite audit sekurang-kurangnya harus terdiri dari 3 orang anggota yang merupakan dari pihak luar perusahaan (independen) yang memiliki kemampuan dalam bidang keuangan dan akuntansi, dan komisaris independen perusahaan yang ter catat sebagai merangkap ketua komite audit.

Pada saat ini keberadaan komite audit sudah menjadi salah satu aspek dalam kriteria penilaian penerapan *good corporate governance*. Selain itu, keberadaan komite audit sudah mendapatkan berbagai respon yang baik dari berbagai pihak seperti Bapepam, Pemerintah, Para Investor, Bursa Efek, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan berbagai skandal yang terus mewarnai dunia bisnis terkait dengan pengelolaan perbankan (Utama, 2014).

Komite audit menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan seberapa jauh tingkat keparahan dan skandal akuntan yang terjadi di setiap perbankan. Para regulator menyadari bahwa dengan adanya komite audit yang efisien dan efektif memiliki peranan yang cukup signifikan (Utama, 2014). Maka dari itu, peranan dan fungsi dari komite audit terus diterapkan dengan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk memperbaiki efektivitas kerja dari komite audit untuk mewujudkan pilar-pilar *good corporate governance* bagi perbankan.

Pada umumnya komite audit memiliki akses langsung dalam pengendalian perbankan. Sehingga diperlukannya suatu mekanisme komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak, dengan kata lain semakin lancar komunikasi maka akan meningkatkan stabilitas bank dari pengendalian perbankan. Hal ini sejalan dengan kerangka GCG yang memiliki kandungan permintaan *disclosure* (pengungkapan) informasi yang kuat.

Selain itu tanggung jawab dan peran komite audit dalam segi GCG memastikan tercapainya tata kelola yang baik sehingga mampu mempengaruhi stabilitas perbankan (Alijoyo, 2004).

Kualitas laporan keuangan akan berdampak terhadap kepercayaan para stakeholder. Setiap perbankan yang baik pastinya akan selalu menjaga tata kelola yang baik, akunabel dan transparan, yang salah satunya juga dari keberadaan auditor yang dimiliki oleh perbankan dan diwadahi dalam komite audit. Komite audit mempunyai peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan fungsi pengawasan dan proses manajemen risiko di perbankan. Tujuan tersebut bermaksud untuk selalu menjaga kepercayaan dari para pemegang saham. Pengelolaan bank yang baik akan mendorong sistem keuangan yang baik sehingga sistem stabilitas perbankan juga akan tetap terjaga.

Tata kelola perbankan yang baik mampu menentukan kemampuan perbankan untuk melindungi seluruh kepentingan *stakeholders*. Dalam hubungannya dengan Lembaga keuangan, stakeholder tentu mengharapkan sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap pemegang saham. Oleh karena itu, struktur perbankan yang mampu menerapkan tata kelola perbankan yang baik melalui beberapa indikator GCG sangat penting untuk stabilitas bank.

4.3.2.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Stabilitas Bank

Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menggunakan software Eviews 10.0, variabel dewan direksi menunjukkan t-statistik -3.334000 dengan probabilitas 0.0025. Probabilitas hasil uji parsial tersebut masih lebih kecil dari pada tingkat probabilitas yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 1%, 5% dan 10%. Artinya variabel dewan direksi (DD) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel stabilitas bank umum syariah dengan nilai koefisien sebesar -0.284357. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap stabilitas bank.

Dewan direksi diukur dengan indikator penjumlahan seluruh anggota dewan direksi yang berada di dalam setiap perbankan. Indikator dewan direksi merupakan salah satu indikator penting dari corporate governance dalam meningkatkan stabilitas perbankan. Direksi memiliki kuasa dalam mengelola sumber daya yang ada pada perbankan dan dalam menentukan arah kebijakan perbankan dalam jangka panjang dan jangnan pendek (Hendratni, 2018).

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian (Eksandy, 2018) menemukan bahwa Dewan Direksi

berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan alat *Return On Asset* (ROA). Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah dewan yang besar akan membawa keuntungan bagi perbankan dilihat dari sudut pandang *resource dependen* yaitu bahwa perbankan bergantung pada dewan agar pengelolaan sumberdayanya bisa dikelola dengan baik. Maka dari itu, dewan direksi menjadi salah satu indikator yang penting dalam tata kelola perbankan, yang mana keberadaan dewan direksi akan menentukan kinerja perusahaan. Keefektifitasan dewan direksi akan memberikan hasil kinerja yang berbeda terhadap perbankan yang pengelolaannya baik dan sehat secara keuangan dibandingkan dengan perbankan yang memiliki masalah secara keuangan.

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dengan selalu memperhatikan tujuan dan kepentingan perusahaan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para *stakeholder* dan pemegang saham. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memantau risiko dan mengelolanya, pengawasan internal secara efisien dan efektif, mengelola karyawan serta memberi laporan terhadap

kinerja perbankan secara keseluruhan kepada pemegang saham (Rusdiyanto dkk , 2019).

Dewan direksi merupakan salah satu indikator vital dalam penerapan GCG yang memiliki tanggung jawab atas manajemen perusahaan. Dengan adanya dewan direksi diharapkan bisa memberikan peningkatan terhadap stabilitas bank yang lebih baik. Dalam undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan jika dewan direksi memiliki hak dalam mewakili perusahaan perbankan dalam berbagai urusan didalam atau diluar perbankan (Chariri dan Addiyah, 2014).

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 menyebutkan bahwa minimal jumlah anggota dewan direksi sebanyak 3 orang. Dalam suatu perbankan, dewan direksi memiliki kebijakan keputusan strategi perbankan secara jangka Panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, agar keputusan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat, efektif dan cepat maka jumlah anggota dewan direksi juga harus tetap diperhatikan (Widyati, 2013).

Dalam beberapa tahun anggota dari dewan direksi melakukan pergantian anggota yang memiliki tujuan untuk merekrut direksi yang lebih kompeten dengan anggota direksi

sebelumnya. Dengan adanya pergantian anggota direksi dianggap lebih efektif dalam kemungkinan terjadinya peningkatan stabilitas perbankan yang lebih baik dari sebelumnya (Septiani dan Handayani, 2018). Dilihat dari kelima bank umum Syariah dalam penelitian ini, bahwa dalam beberapa tahun selalu mengalami perubahan dalam anggota naik itu penambahan anggota, pengurangan anggota atau mengganti anggota direksi dengan jumlah yang sama pada periode sebelumnya.

Stabilitas bank merupakan salah satu faktor terpenting didalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (King dan Levine, 2003). Dengan demikian untuk memperkuat stabilitas perbankan telah dikeluarkannya Pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) Perbankan pada tahun 2014. Pedoman tersebut memberi penegasan bahwa penerapan GCG merupakan persyaratan yang wajib dan mutlak untuk menjadikan perbankan lebih kompetitif. serta mempertahankan kepercayaan publik.

4.3.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menggunakan software Eviews 10.0, variabel dewan komisaris

independen menunjukkan t-statistik -1.545956 dengan probabilitas 0.1298. Probabilitas hasil uji parsial tersebut masih lebih besar dari pada tingkat probabilitas yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 1%, 5% dan 10%. Artinya variabel dewan komisaris independen (DKI) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel stabilitas bank umum syariah dengan nilai koefisien sebesar -0.225146. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap stabilitas bank.

Dewan komisaris independen diukur dengan indikator pembagian dari anggota dewan komisaris independen dengan anggota dewan komisaris yang berada di dalam setiap perbankan. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perbankan.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian Eksandy (2018) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dewan komisaris independen terhadap stabilitas bank umum Syariah. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap stabilitas. Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang bukan dari orang yang berurusan langsung pada perbankan atau pegawai, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen diangkat karena memiliki beberapa pengalaman yang dianggap dapat bermanfaat terhadap

perbankan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dari anggota dewan komisaris independen memberikan sebuah kerumitan tersendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris. Terlebih karena dewan komisaris independen adalah utusan dari para pemegang saham, maka dari itu semakin banyak dewan komisaris independen maka akan berpengaruh negatif terhadap stabilitas perbankan (Yunina dan Nisa, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh karena dewan komisaris independen merupakan orang atau anggota yang berasal dari luar perbankan, ini memungkinkan pengetahuan dari dewan komisaris independen terkait dengan situasi perbankan relatif terbatas. Dengan demikian hal itu akan menyebabkan kurangnya peran efektif terhadap stabilitas perbankan, karena mungkin dewan komisaris dan dewan direksi tidak terlalu mempertimbangkan kritik dan saran dari dewan komisaris independen (Mutmainah dan Wijayanti, 2012).

Menurut Undang-undang yang berlaku, dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk melaksanakan fungsi atas strategi perusahaan dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh direksi serta memberikan arahan kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan dengan bertanggung jawab dan kehati-hatian, itikad yang baik serta

menjalankan fungsi untuk memperkuat dari citra perusahaan dimata para pemegang saham dan masyarakat (Rusdiyanto dkk, 2019). Menurut Peraturan Percatatan Nomor IA terkait ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa, Jumlah ideal dewan komisaris independen minimum sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Sarafina dan Saifi, 2017).

Salah satu indikator dari *corporate governace* yaitu dewan komisaris independen, (Romano & Guerrini, 2012) mengintreprestasikan jika persentase direktur independen semakin tinggi, maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya penipuan keuangan dengan alasan yang lebih tinggi bobot relatif direktur independen yang akan memberi kepastian pengendalian yang lebih efektif. Saat ini sudah banyak negara telah memperkuat rekomendasi tentang komposisi dan independensi dewan.

Komisaris independen bisa bertindak sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara para manajer internal dan menasehati para manajemen serta mengawasi kebijakan manajemen. Komisaris independen bertugas untuk melakukan fungsi monitoring agar terjadinya perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Sehingga semakin tinggi proporsi dari dewan komisaris independen maka akan semakin rendah stabilitas perbankan perbankan (Rahardja, 2014).

Dalam suatu perbankan, ternyata masih banyak perbankan yang masih belum bisa dalam memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, khususnya terkait dengan Batasan waktu masa jabatan dewan komisaris independen yang hanya berlaku dalam dua periode saja. Berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti, sampel lima bank yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahun 2010-2019 menyebutkan bahwa banyak anggota dewan komisaris yang menjabat lebih dari dua periode, bahkan ada dewan komisaris independen yang menjabat 3 tahun hingga 5 tahun berturut-turut. Dengan demikian terlihat bahwa keengganan para komisaris independen dan direktur independen untuk meninggalkan salah satu jabatan yang dipegangnya sebagai komisaris independen dan direktur independen di perusahaan atau perbankan yang lain.

Seorang anggota yang menjabat sebagai komisaris independen dan direktur independen lebih dari dua periode, dikhawatirkan akan membuat anggota tersebut tidak independen lagi, karena apabila dewan komisaris dan direktur independen menjabat terlalu lama dimungkinkan akan bisa memberi pengaruh atas independensinya di perbankan tersebut. Selain itu, dengan adanya rangkap jabatan, waktu yang dimiliki oleh dewan komisaris independen akan terganggu dan tidak fokus (Effendi, 2017).

Kecenderungan dalam pengangkatan dewan anggota komisaris independen hanya sebagai formalitas dalam memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dan kurangnya kesadaran dari dewan komisaris independen dalam melaksanakan pengawasan menyebabkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah. Maka dari itu, keberadaan dewan komisaris independen tidak memberi peningkatan efektivitas pengawasan serta tidak memberikan peningkatan dalam stabilitas bank.

Peran *corporate governance* menjadi perhatian yang penting untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* yaitu menciptakan keseimbangan bagi seluruh pemegang saham melalui pemisahan antara peraturan formal dan non formal, batasan dan standar dibuat untuk memberi arahan serta mengontrol Lembaga keuangan tersebut agar melindungi kepentingan semua pihak. Tata kelola perusahaan yang buruk tidak hanya dapat berdampak merugikan perbankan, tetapi juga akan berdampak terhadap stabilitas perbankan.

4.3.2.4 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menggunakan software Eviews 10.0, variabel dewan komisaris menunjukkan t-statistik 1.312047 dengan probabilitas 0.1976.

Probabilitas hasil uji parsial tersebut masih lebih besar dari pada tingkat probabilitas yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 1%, 5% dan 10%. Artinya variabel dewan komisaris (DK) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel stabilitas bank umum syariah dengan nilai koefisien sebesar 0.159003. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap stabilitas bank.

Dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator seluruh jumlah dari anggota dewan komisaris yang ada didalam setiap perbankan syariah. Peran anggota dewan komisaris dalam suatu perbankan lebih diutamakan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi.

Anggota dewan komisaris yang ditetapkan oleh OJK tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan dan atau hubungan kepemilikan saham untuk menghindari terjadinya *conflict of interest*. Dibuktikan dengan salah satu sampel bank yang digunakan peneliti yaitu Bank BRI Syariah yang tercatat bahwa hingga tahun 2019, dewan komisaris tidak mempunyai saham hingga mencapai 5% atau lebih dari modal disetor di Bank BRI Syariah.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian (Azizah dan Erinos, 2018) mengemukakan bahwa dewan

komisaris tidak memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas perbankan. Hasil ini memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah dari anggota dewan komisaris maka akan semakin rendah kinerja perbankan, yang artinya bahwa kecil besarnya jumlah anggota dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi stabilitas pada perbankan.

Hal ini disebabkan karena pada sektor keuangan memiliki banyak pihak eksternal perbankan yang mengawasi perbankan, khususnya pada sektor keuangan. Hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu ditolak yang diduga beberapa bank umum Syariah tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pada Pasal 25 PBI No.11/3/PBI 2009 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris paling kurang berjumlah 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah dari anggota dewan direksi. Kurangnya jumlah dari dewan komisaris menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan terhadap aktivitas perbankan.

Dewan komisaris adalah organ perbankan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perbankan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat atau arahan kepada direksi dalam pengelolaan perbankan dengan iktikad yang baik, tanggungjawab dan kehati-hatian. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam menerapkan tata kelola perbankan yang baik sesuai dengan fungsi

pengawasan yang dilakukan. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab serta tugas antara lain melaporkan kendala yang menyebabkan penurunan stabilitas perbankan, memberikan saran dan pendapat terkait dengan anggaran tahunan dan rencana kerja serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS (Rusdiyanti dkk, 2019).

Dalam suatu perbankan dewan komisaris lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implikasi kebijakan direksi. Fungsi dan peran dari dewan komisaris sangat penting karena dengan adanya dewan komisaris diharapkan mampu meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara pemegang saham dengan dewan direksi. Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam memberi pengawasan terhadap jalannya perbankan dan memberikan arahan strategi serta memastikan para manager mampu dalam meningkatkan stabilitas perbankan sebagai bagian dari tujuan perusahaan (Rahadja, 2014)

Jika semakin besar anggota dewan komisaris dalam setiap perbankan maka dianggap kurang efektif dalam memonitoring dan melakukan pengawasan terhadap manajemen perbankan karena akan sulit dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dalam pengambilan keputusan yang tidak membaik (Chariri dan Addiyah, 2014).

4.3.2.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Stabilitas Bank

Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menggunakan software Eviews 10.0, variabel dewan pengawas syariah menunjukkan t-statistik 2.390905 dengan probabilitas 0.00220. Probabilitas hasil uji parsial tersebut masih lebih kecil dari pada tingkat probabilitas yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 1%, 5% dan 10%. Artinya variabel dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel stabilitas bank umum syariah dengan nilai koefisien sebesar 0.475992. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kelima yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap stabilitas bank.

Dewan pengawas syariah diukur dengan menggunakan indikator seluruh jumlah dari anggota dewan pengawas syariah yang ada didalam setiap perbankan Syariah. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/2009 tentang bank umum Syariah, jumlah dari anggota dewan pengawas Syariah yaitu sekurang-kurang besarnya berjumlah 2 (dua) anggota atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian Ekasari dan Deny (2019), mengemukakan bahwa pengawas syariah memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas perbankan. Didalam

perbankan dewan pengawas Syariah (DPS) yang semakin besar akan menyebabkan mekanisme monitoring manajemen perbankan yang semakin baik. Hasil penelitian dari Kholid dan Bactiar (2015) juga menyebutkan bahwa dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan mampu menurunkan masalah agensi yang dilakukan manajemen bank Syariah, sehingga jika masalah agensi mampu teratasi maka stabilitas bank Syariah akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 3 mengemukakan bahwa Dewan pengawas Syariah yaitu anggota yang mempunyai suatu kompetensi yaitu yang mempunyai pengalaman serta pengetahuan pada Syariah muamalah, keuangan atau perbankan secara umum. Sedangkan reputasi bisa disebutkan sebagai rekam jejak anggota DPS dalam meningkatkan stabilitas perusahaan (Nugrehani, 2018).

Dewan pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam perkembangan perbankan Syariah. fungsi utama dari DPS adalah mengarahkan, mengawasi dan meninjau kegiatan bank Syariah serta harus bisa memastikan bahwa bank Syariah telah beroperasi sesuai dengan syariat Islam. DPS memiliki wewenang yang diyakini bisa meningkatkan pengungkapan tanggung jawab social perbankan Syariah (Sutami dan Rustan, 2019).

DPS merupakan suatu badan independen yang diletakkan pada suatu perbankan Syariah yang memiliki peran untuk

mengawasi penerapan prinsip syariah dalam operasional usaha bank. DPS merupakan anggota yang terdiri dari pakar dalam bidang *fiqh* muamalah yang memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. DPS dalam mengawasi operasional bank syariah wajib mengacu kepada fatwa DSN dalam memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan kriteria-kriteria yang telah tercatat dalam fatwa (Faozan, 2013).

Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan DSN-MUI No.09/MUI/III/2001 mengungkapkan bahwa dalam bank Syariah DPS berada pada tingkat yang sama dengan dewan komisaris sebagai pengawas direksi. Jika dewan komisaris memiliki tugas dalam mengawasi kinerja manajemen bank, maka DPS memiliki tugas dalam mengawasi manajemen bank yang berkaitan dengan operasionalnya agar terjaga serta selalu dalam prinsip Syariah yang difatwakan oleh dewan Syariah nasional (DSN). Keberadaan DPS dalam perbankan syariah menjadi hal yang sangat penting sebagai pihak yang memiliki peran dalam mengawasi operasional yang berjalan sesuai yang diharapkan. DPS diharapkan mampu memastikan dan menjalin perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip Syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil yang telah dilakukan dalam pembahasan terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap stabilitas bank umum Syariah di Indonesia dengan metode analisis data panel, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Secara parsial variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Z-score. Komite audit menjadi salah satu yang memiliki peran penting di setiap perbankan yang dikarenakan pengawasan komite audit mampu mempengaruhi stabilitas bank.

Secara parsial variabel dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Z-score. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah dewan yang besar akan membawa keuntungan bagi perbankan dilihat dari sudut pandang *resource dependen* yaitu bahwa perbankan bergantung pada dewan agar pengelolaan sumberdayanya bisa dikelola dengan baik.

Secara parsial variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Z-score. Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang bukan dari orang yang berurusan langsung

pada perbankan atau pegawai, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen diangkat karena memiliki beberapa pengalaman yang dianggap dapat bermanfaat terhadap perbankan tersebut.

Secara parsial variabel dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum Syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Z-score. Hal ini disebabkan karena pada sektor keuangan memiliki banyak pihak eksternal perbankan yang mengawasi perbankan, khususnya pada sektor keuangan.

Secara parsial variabel dewan pengawas Syariah berpengaruh terhadap stabilitas bank umum Syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Z-score. Hal ini ditandai dengan semakin besar jumlah anggota DPS akan menyebabkan mekanisme monitoring manajemen perbankan yang semakin baik. adanya pengawasan yang baik diharapkan mampu menurunkan masalah agensi yang dilakukan manajemen bank Syariah, sehingga jika masalah agensi mampu teratasi maka stabilitas bank Syariah akan menjadi lebih baik.

5.2 Saran

Temuan Penelitian yang tidak signifikan yaitu pada variabel dewan komisaris independen. Perbankan Syariah perlu membuka ruang untuk orang-orang yang berkopoten dibidangnya secara independen untuk menduduki dewan komisaris independen. Hal ini bertujuan untuk melihat dunia perbankan secara lebih komprehensif baik dilihat dari sisi internal maupun eksternal. jadi tidak ada *double agent* atau tidak terjadi konflik

interest karena adanya rangkap jabatan. Peraturan yang telah ditetapkan bahwa bahwa dewan komisaris maksimal menduduki jabatan selama 2 tahun memiliki tujuan untuk merefreshing atau melihat kinerja dewan komisaris independen. Jika dewan komisaris independen dalam perbankan melebihi batas yang telah ditentukan maka harus diganti dengan peraturan peundangan-undangan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya anggota dewan direksi yang banyak maka memungkinkan para direksi akan sulit dalam mengambil keputusan maka perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan serta perlu dipertimbangkan untuk membuat dewan direksi yang rapi dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan perusahaan perbankan, sehingga perusahaan tidka kehilangan arah dan kestabilannya tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis\$. *Journal of Accounting and Economics*, 27.
- Anshori, A. G. (2008). *Hukum Perbankan Hukum*. Yogyakarta: PT Refika Aditama
- Bastomi, M., Salim, U., & Aisjah, S. (2017). The Role of Corporate Governance and Risk Management on Banking Financial Performance in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(4), 670–680.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i4.1285>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed). Pearson.
- Dewi, A. S., Sari, D., & Abaharis, H. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Benefita*, 3(3), 445. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3530>
- Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2009). The Credit Crisis: Conjectures about Causes and Remedies. *American Economic Review*, 99(2), 606–610.
<https://doi.org/10.1257/aer.99.2.606>
- Effendi, M. A. (2017). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi* Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat

- Eksandy, A. (2018). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 10.
- El-Chaarani, H. (2014). THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE PERFORMANC E OF LEBANESE BANKS. *H. El*, 8(5), 12.
- Fanta, A. B. (2013). Corporate Governance and impact on Bank Performance. *Journal of Finance and Accounting*, 1(1), 19.
<https://doi.org/10.11648/j.jfa.20130101.12>
- Gravetter, F. J., & Forzano, L.-A. B. (2016). *Research methods for the behavioral sciences* (5e ed.). Cengage Learning.
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews 10*. Edisi ke-2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huq, S. M.-U.-, Zheng, C., & Gupta, A. D. (2018). Does Bank Corporate Governance Matter for Bank Performance and Risk-Taking? New Insights of an Emerging Economy. *Asian Economic and Financial Review*, 8(2), 205–230. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.82.205.230>
- Indriyani dan Asytuti—2019—PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJ.pdf. (n.d.).
- Lin, H.-Y. (2010). *The Agency Problem in Taiwan's Corporate Governance*. 5(1), 10.

- Loekita, V. K. K., & Sukartha, I. M. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance Pada Manajemen Laba Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Merger dan Akuisisi*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 27.
- Maharani, D. A., & Wulandari, H. W. (2017). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada Industri Telekomunikasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 5(1), 19.
<https://doi.org/10.17933/jppi.2015.0501002>
- Nugroho, L., & Bararah, H. N. (2018). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN BIAYA OPERASIONAL DAN PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP STABILITAS KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2017. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 160.
<https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.852>
- Nuswandari, C. (2009). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA*. 16(2), 15.
- Olayemi, A. A. (2015). *Impact Of Corporate Governance On Banks Profitability: Study Of Selected Commercial Banks In Nigeria*. Jurnal of Global Accounting. 5 (2), 8.
- Poudel, R. P. S. (2012a). *The impact of credit risk management on financial performance of commercial banks in Nepal*. 1(5), 7.

- Rachmawati, E. N. (2020). HUBUNGAN KEUNTUNGAN DENGAN RESIKO DALAM PERSPEKTIF FIQIH APLIKASINYA PADA INSTITUSI KEUANGAN ISLAM. *Islamic Banking and Finance*, 13.
- Rahmadeni, & Wulandari, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi pada Kota Metropolitan di Indonesia dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika*, 3(2), 34–42.
- Ramdhaningsih, A. (2013). *PENGARUH INDIKATOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS PADA PENGUNGKAPAN*. 19.
- Romano, G., & Guerrini, A. (2012). Corporate governance and accounting enforcement actions in Italy. *Managerial Auditing Journal*, 27(7), 622–638. <https://doi.org/10.1108/02686901211246778>
- Rusdiyanto., Susetyorini., dan Elan, U. (2019). *Good Corporate Governance Teori dan Implementasi di Indonesia*. Gresik: Refika Aditama
- Sarantakos, S. (2013). *Social research* (4th edition). Palgrave Macmillan.
- SEC Testimony: Implementation of the Sarbanes-Oxley Act of 2002* (William H. Donaldson). (n.d.). Retrieved November 25, 2020, from <https://www.sec.gov/news/testimony/090903tswhd.htm>
- Segoviano, M. A., & Goodhart, C. (n.d.). *Banking Stability Measures*. 56.
- Shungu, P., Ngirande, H., & Ndlovu, G. (2014). Impact of Corporate Governance on the Performance of Commercial Banks in Zimbabwe. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n15p93>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Supriatna, N., & M. Kusuma, A. (2009). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v1i1.8907>
- Tertius, M. A., & Christiaawan, Y,J. (2015). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*. *Jurnal Bisnis Accounting Review*, 3 (1)
- Trihastuti, A., & Dewi, M. S. (2016). PENILAIAN KUALITAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH MERGER STUDI KASUS PADA PT. BANK MANDIRI, Tbk. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(01). <https://doi.org/10.30996/jea17.v1i01.646>
- Uchenna, L. (2016). *IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE PROFITABILITY OF THE NIGERIAN BANKING SECTOR* (No. 1). 7(1), 12.
- URGENSI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH*
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish* (Second edition). The Guilford Press.
- Yunina, F. (2020). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37598/jam.v10i1.779>

Zagorchev, A., & Gao, L. (2015). Corporate governance and performance of financial institutions. *Journal of Economics and Business*, 82, 17–41.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2015.04.0>

Lampiran 1

Data Stabilitas Bank Z-Score (Y)

BANK (SYARIAH)	TAHUN	ROA	EQTAA	Zscore	Z-Score
BCA	2010	1.13%	0.344081936	32.67837067	1.514260395
BCA	2011	0.90%	0.252987235	24.09046465	1.381845177
BCA	2012	0.80%	0.19518567	18.68349506	1.271458122
BCA	2013	1.00%	0.152969652	14.98551884	1.175671784
BCA	2014	0.80%	0.209051875	19.95853168	1.300128588
BCA	2015	1.00%	0.242886452	23.25362201	1.366490609
BCA	2016	1.10%	0.220445577	21.28207314	1.328013931
BCA	2017	1.20%	0.193513549	18.89755009	1.276405505
MEGA	2010	1.90%	0.082319367	9.316601403	0.969257515
MEGA	2011	1.58%	0.078287055	8.651569888	0.93709492
MEGA	2012	3.81%	0.076009093	10.49265271	1.020885299
MEGA	2013	2.33%	0.084421047	9.905253919	0.995865613
MEGA	2014	0.29%	0.110885832	10.46292794	1.019653234
MEGA	2015	0.30%	0.157250954	14.7355269	1.16836567
MEGA	2016	2.63%	0.173065871	18.33225374	1.26321586
MEGA	2017	1.56%	0.171021424	17.16036589	1.234526543
BUKOPIN	2010	0.74%	0.06543671	6.69754074	0.825915364
BUKOPIN	2011	0.52%	0.093689218	9.093142276	0.958713986
BUKOPIN	2012	0.55%	0.075515444	7.449598386	0.87213286
BUKOPIN	2013	0.69%	0.067376088	6.829895655	0.834414069
BUKOPIN	2014	0.27%	0.097123205	9.179025085	0.962796557
BUKOPIN	2015	0.79%	0.108643602	10.71651268	1.030053482
BUKOPIN	2016	-1.12%	0.113762624	9.430922325	0.974554168
BUKOPIN	2017	0.02%	0.122901956	11.31957178	1.053829998
BRIS	2010	0.35%	0.13923	13.12420285	1.118072934
BRIS	2011	0.20%	0.08630	8.119803093	0.909545498
BRIS	2012	0.19%	0.07584	7.14880868	0.854233674
BRIS	2013	1.15%	0.09759	10.03097868	1.001343307
BRIS	2014	0.08%	0.08428	7.823169397	0.893382734
BRIS	2015	0.77%	0.09657	9.587529681	0.981706721
BRIS	2016	0.95%	0.09066	9.209640717	0.964242688
BRIS	2017	0.51%	0.08248	8.052888777	0.905951701

BNI	2010	2.50%	0.133236249	14.55026908	1.162871025
BNI	2011	2.90%	0.126172849	14.26858085	1.154380781
BNI	2012	2.90%	0.130586492	14.67442769	1.166561173
BNI	2013	3.40%	0.123321824	14.46618516	1.160354019
BNI	2014	3.50%	0.146485378	16.68809205	1.222406687
BNI	2015	2.60%	0.154224874	16.57218516	1.219379777
BNI	2016	2.70%	0.148008729	16.09254591	1.206624757
BNI	2017	2.70%	0.142251339	15.56313765	1.192097159
BSM	2010	2.21%	0.344081936	33.67146111	1.527261962
BSM	2011	1.95%	0.252987235	25.05596924	1.398911207
BSM	2012	2.25%	0.19518567	20.01681093	1.301394887
BSM	2013	1.53%	0.152969652	15.47286878	1.189570843
BSM	2014	0.17%	0.209051875	19.37922893	1.287336493
BSM	2015	0.56%	0.242886452	22.84902961	1.358867761
BSM	2016	0.59%	0.220445577	20.81311377	1.318337058
BSM	2017	0.59%	0.193513549	18.3366379	1.263319709
Standar Deviasi ROA		0.010875142			

Lampiran 2

Data Komite Audit (X1)

BANK (SYARIAH)	TAHUN	X1 (Komite Audit)
BCA	2010	3
BCA	2011	3
BCA	2012	3
BCA	2013	3
BCA	2014	3
BCA	2015	3
BCA	2016	3
BCA	2017	3
MEGA	2010	3
MEGA	2011	3
MEGA	2012	3
MEGA	2013	3
MEGA	2014	3
MEGA	2015	3
MEGA	2016	3
MEGA	2017	3
BUKOPIN	2010	3
BUKOPIN	2011	3
BUKOPIN	2012	3
BUKOPIN	2013	3
BUKOPIN	2014	3
BUKOPIN	2015	3
BUKOPIN	2016	2
BUKOPIN	2017	2
BRIS	2010	2
BRIS	2011	3
BRIS	2012	3
BRIS	2013	3
BRIS	2014	3
BRIS	2015	3
BRIS	2016	4
BRIS	2017	4
BNI	2010	4
BNI	2011	4
BNI	2012	4

BNI	2013	5
BNI	2014	5
BNI	2015	5
BNI	2016	6
BNI	2017	5
BSM	2010	3
BSM	2011	3
BSM	2012	4
BSM	2013	6
BSM	2014	5
BSM	2015	5
BSM	2016	6
BSM	2017	6

Lampiran 3

Data Dewan Direksi (X2)

BANK (SYARIAH)	TAHUN	X2 (Dewan Direksi)
BCA	2010	3
BCA	2011	3
BCA	2012	3
BCA	2013	3
BCA	2014	3
BCA	2015	3
BCA	2016	3
BCA	2017	3
MEGA	2010	4
MEGA	2011	4
MEGA	2012	5
MEGA	2013	5
MEGA	2014	5
MEGA	2015	5
MEGA	2016	5
MEGA	2017	5
BUKOPIN	2010	3
BUKOPIN	2011	3
BUKOPIN	2012	3
BUKOPIN	2013	4
BUKOPIN	2014	4
BUKOPIN	2015	4
BUKOPIN	2016	4
BUKOPIN	2017	4
BRIS	2010	4
BRIS	2011	4
BRIS	2012	4
BRIS	2013	4
BRIS	2014	4
BRIS	2015	4
BRIS	2016	4
BRIS	2017	4
BNI	2010	4
BNI	2011	5
BNI	2012	4
BNI	2013	4

BNI	2014	5
BNI	2015	5
BNI	2016	4
BNI	2017	5
BSM	2010	3
BSM	2011	3
BSM	2012	3
BSM	2013	4
BSM	2014	4
BSM	2015	4
BSM	2016	4
BSM	2017	4

Lampiran 4

Data Dewan Komisaris Independen (X3)

BANK (SYARIAH)	TAHUN	X3 (Dewan Komisaris Independen)
BCA	2010	2
BCA	2011	2
BCA	2012	2
BCA	2013	2
BCA	2014	2
BCA	2015	2
BCA	2016	2
BCA	2017	2
MEGA	2010	2
MEGA	2011	2
MEGA	2012	2
MEGA	2013	2
MEGA	2014	2
MEGA	2015	2
MEGA	2016	2
MEGA	2017	2
BUKOPIN	2010	2
BUKOPIN	2011	2
BUKOPIN	2012	2
BUKOPIN	2013	2
BUKOPIN	2014	2
BUKOPIN	2015	2
BUKOPIN	2016	2
BUKOPIN	2017	2
BRIS	2010	2
BRIS	2011	2
BRIS	2012	2
BRIS	2013	2
BRIS	2014	2
BRIS	2015	2
BRIS	2016	3
BRIS	2017	3
BNI	2010	3
BNI	2011	3
BNI	2012	3

BNI	2013	3
BNI	2014	2
BNI	2015	3
BNI	2016	2
BNI	2017	2
BSM	2010	2
BSM	2011	2
BSM	2012	2
BSM	2013	2
BSM	2014	2
BSM	2015	2
BSM	2016	2
BSM	2017	2

Lampiran 5

Data Dewan Komisaris (X4)

BANK (SYARIAH)	TAHUN	X4 (Dewan Komisaris)
BCA	2010	3
BCA	2011	3
BCA	2012	3
BCA	2013	3
BCA	2014	3
BCA	2015	3
BCA	2016	3
BCA	2017	3
MEGA	2010	3
MEGA	2011	3
MEGA	2012	3
MEGA	2013	3
MEGA	2014	3
MEGA	2015	3
MEGA	2016	3
MEGA	2017	3
BUKOPIN	2010	3
BUKOPIN	2011	3
BUKOPIN	2012	3
BUKOPIN	2013	3
BUKOPIN	2014	3
BUKOPIN	2015	3
BUKOPIN	2016	3
BUKOPIN	2017	4
BRIS	2010	4
BRIS	2011	4
BRIS	2012	4
BRIS	2013	4
BRIS	2014	4
BRIS	2015	4
BRIS	2016	4
BRIS	2017	4
BNI	2010	4
BNI	2011	5
BNI	2012	5
BNI	2013	5

BNI	2014	5
BNI	2015	4
BNI	2016	4
BNI	2017	4
BSM	2010	3
BSM	2011	3
BSM	2012	3
BSM	2013	4
BSM	2014	3
BSM	2015	4
BSM	2016	4
BSM	2017	4

Lampiran 6

Data Dewan Pengawas Syariah (X5)

BANK (SYARIAH)	TAHUN	X5 (Dewan Pengawas Syariah)
BCA	2010	2
BCA	2011	2
BCA	2012	2
BCA	2013	2
BCA	2014	2
BCA	2015	2
BCA	2016	2
BCA	2017	2
MEGA	2010	2
MEGA	2011	2
MEGA	2012	3
MEGA	2013	3
MEGA	2014	3
MEGA	2015	3
MEGA	2016	3
MEGA	2017	3
BUKOPIN	2010	3
BUKOPIN	2011	3
BUKOPIN	2012	2
BUKOPIN	2013	2
BUKOPIN	2014	2
BUKOPIN	2015	2
BUKOPIN	2016	2
BUKOPIN	2017	2
BRIS	2010	2
BRIS	2011	2
BRIS	2012	2
BRIS	2013	2
BRIS	2014	2
BRIS	2015	2
BRIS	2016	3
BRIS	2017	2
BNI	2010	2
BNI	2011	2

BNI	2012	2
BNI	2013	2
BNI	2014	2
BNI	2015	2
BNI	2016	2
BNI	2017	2
BSM	2010	2
BSM	2011	2
BSM	2012	2
BSM	2013	2
BSM	2014	2
BSM	2015	2
BSM	2016	2
BSM	2017	2

Lampiran 7

Hasil Statistik Deskriptif

Date: 06/01/21
Time: 15:57
Sample: 2010 2017

	Y	LNx1	LNx2	LNx3	LNx4	LNx5
Mean	1.133491	1.290124	1.396518	0.769172	1.299584	0.836749
Median	1.162922	1.098612	1.386294	0.693147	1.386294	0.693147
Maximum	1.525468	1.945910	1.945910	1.098612	1.609438	1.098612
Minimum	0.824121	0.693147	1.098612	0.693147	1.098612	0.693147
Std. Dev.	0.183165	0.308863	0.227146	0.159933	0.210891	0.195970
Skewness	0.102806	0.345469	0.208259	1.601282	0.343114	0.609850
Kurtosis	2.100768	2.622608	2.361519	3.564103	1.534737	1.371917
Jarque-Bera Probability	1.701790 0.427033	1.239640 0.538041	1.162290 0.559258	21.14924 0.000026	5.235814 0.072955	8.276644 0.015950
Sum	54.40758	61.92595	67.03285	36.92025	62.38002	40.16397
Sum Sq. Dev.	1.576824	4.483628	2.424975	1.202189	2.090327	1.804996
Observations	48	48	48	48	48	48

Lampiran 8

Hasil Model *Common Effect*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/01/21 Time: 15:59
Sample: 2010 2017
Periods included: 8
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.293142	0.132665	9.747417	0.0000
LNx1	0.307346	0.071415	4.303671	0.0001
LNx2	-0.738498	0.115378	-6.400694	0.0000
LNx3	-0.462407	0.124909	-3.701948	0.0006
LNx4	0.265223	0.128896	2.057659	0.0459
LNx5	0.580999	0.108444	5.357582	0.0000
R-squared	0.627809	Mean dependent var		1.133491
Adjusted R-squared	0.583500	S.D. dependent var		0.183165
S.E. of regression	0.118209	Akaike info criterion		-1.316259
Sum squared resid	0.586880	Schwarz criterion		-1.082359
Log likelihood	37.59022	Hannan-Quinn criter.		-1.227868
F-statistic	14.16905	Durbin-Watson stat		1.120778
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 9
Hasil Model *Fixed effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/01/21 Time: 15:59
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.023525	0.267229	3.830134	0.0005
LNX1	0.157658	0.071693	2.199059	0.0342
LNX2	-0.413144	0.089041	-4.639914	0.0000
LNX3	-0.157823	0.121474	-1.299234	0.2019
LNX4	0.159003	0.121187	1.312047	0.1976
LNX5	0.475992	0.199085	2.390905	0.0220

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.871216	Mean dependent var	1.133491
Adjusted R-squared	0.836410	S.D. dependent var	0.183165
S.E. of regression	0.074083	Akaike info criterion	-2.169199
Sum squared resid	0.203069	Schwarz criterion	-1.740382
Log likelihood	63.06078	Hannan-Quinn criter.	-2.007148
F-statistic	25.03035	Durbin-Watson stat	1.786019
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10

Hasil Model *Random Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/01/21 Time: 15:59
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.293142	0.083143	15.55315	0.0000
LNX1	0.307346	0.044757	6.867012	0.0000
LNX2	-0.738498	0.072309	-10.21306	0.0000
LNX3	-0.462407	0.078283	-5.906894	0.0000
LNX4	0.265223	0.080781	3.283237	0.0021
LNX5	0.580999	0.067964	8.548651	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.074083	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.627809	Mean dependent var	1.133491
Adjusted R-squared	0.583500	S.D. dependent var	0.183165
S.E. of regression	0.118209	Sum squared resid	0.586880
F-statistic	14.16905	Durbin-Watson stat	1.120778
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.627809	Mean dependent var	1.133491
Sum squared resid	0.586880	Durbin-Watson stat	1.120778

Lampiran 12

Hasil Uji Hausman

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/01/21 Time: 16:00
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.293142	0.083143	15.55315	0.0000
LNX1	0.307346	0.044757	6.867012	0.0000
LNX2	-0.738498	0.072309	-10.21306	0.0000
LNX3	-0.462407	0.078283	-5.906894	0.0000
LNX4	0.265223	0.080781	3.283237	0.0021
LNX5	0.580999	0.067964	8.548651	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.074083	1.0000

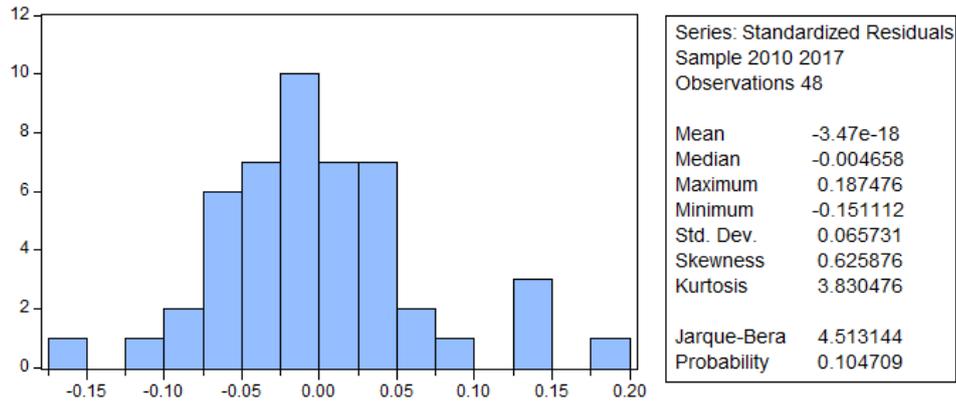
Weighted Statistics			
R-squared	0.627809	Mean dependent var	1.133491
Adjusted R-squared	0.583500	S.D. dependent var	0.183165
S.E. of regression	0.118209	Sum squared resid	0.586880
F-statistic	14.16905	Durbin-Watson stat	1.120778
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.627809	Mean dependent var	1.133491
Sum squared resid	0.586880	Durbin-Watson stat	1.120778

Lampiran 13

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

	Y	X1_KA	X2_DD	X3_DKI	X4_DK	X5_DPS
Y	1.000000	0.266155	-0.248033	-0.267143	-0.017396	0.257663
LNX1	0.266155	1.000000	0.435222	0.338883	0.614019	0.154113
LNX2	-0.248033	0.435222	1.000000	0.190112	0.590179	0.544975
LNX3	-0.267143	0.338883	0.190112	1.000000	0.484980	-0.020926
LNX4	-0.017396	0.614019	0.590179	0.484980	1.000000	0.153347
LNX5	0.257663	0.154113	0.544975	-0.020926	0.153347	1.000000

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.514290	Prob. F(2,39)	0.2326
Obs*R-squared	3.386822	Prob. Chi-Square(2)	0.1839

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/01/21 Time: 16:46

Sample: 2 48

Included observations: 47

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000203	0.015269	0.013274	0.9895
D(LNX1)	0.011812	0.106644	0.110763	0.9124
D(LNX2)	-0.051626	0.101416	-0.509051	0.6136
D(LNX3)	-0.024811	0.114744	-0.216226	0.8299
D(LNX4)	0.025069	0.154004	0.162780	0.8715
D(LNX5)	0.024349	0.118974	0.204660	0.8389
RESID(-1)	-0.291600	0.167640	-1.739442	0.0898
RESID(-2)	-0.065167	0.162471	-0.401102	0.6905
R-squared	0.072060	Mean dependent var		5.91E-19
Adjusted R-squared	-0.094493	S.D. dependent var		0.098769
S.E. of regression	0.103330	Akaike info criterion		-1.547943
Sum squared resid	0.416404	Schwarz criterion		-1.233024
Log likelihood	44.37666	Hannan-Quinn criter.		-1.429437
F-statistic	0.432654	Durbin-Watson stat		1.992927
Prob(F-statistic)	0.875680			

Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.044692	Prob. F(5,42)	0.4044
Obs*R-squared	5.309356	Prob. Chi-Square(5)	0.3793
Scaled explained SS	3.658474	Prob. Chi-Square(5)	0.5996

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/01/21 Time: 16:48

Sample: 1 48

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003585	0.013995	0.256183	0.7991
LNX1	-0.006169	0.007533	-0.818839	0.4175
LNX2	0.002853	0.012171	0.234403	0.8158
LNX3	0.011353	0.013177	0.861624	0.3938
LNX4	-0.010353	0.013597	-0.761427	0.4507
LNX5	0.016601	0.011440	1.451209	0.1542
R-squared	0.110612	Mean dependent var		0.008780
Adjusted R-squared	0.004732	S.D. dependent var		0.012499
S.E. of regression	0.012470	Akaike info criterion		-5.814560
Sum squared resid	0.006531	Schwarz criterion		-5.580660
Log likelihood	145.5494	Hannan-Quinn criter.		-5.726169
F-statistic	1.044692	Durbin-Watson stat		1.765068
Prob(F-statistic)	0.404391			

Lampiran 14
Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Novi Isdayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 19 Maret 1999
Alamat Asal : Jalan Sakura Banjar Mandar Desa Cupel
RT. 001 RW. 002. Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana Provinsi Bali
Telepon/Hp : 085858064702
E-mail : noviisdayanti42@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2005 : TK Hasyim Asyari
2005-2011 : SD N 1 Cupel
2011-2014 : Madrasah Tsanawiyah Cupel
2014-2017 : Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana
2017-2021 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas
Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2017 : Sekolah Kursus Bahasa Inggris di Pare
2017-2018 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali Malang
2017-2018 : Program Khusus Perkuliaham bahasa Arab
(PKPBA) UIN Malang
2018-2019 : English Language Center (ELC) UIN
Malang

Pengalaman Organisasi

Tahun 2019-2020 :Anggota GPAN (Gerakan Perpustakaan Malang)

Tahun 2020 : Anggota KSEI SESCOB

Tahun 2019-2020 ;Anggota GenBI

Lampiran 15

Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Novi Isdayanti
NIM/Jurusan : 17540008/ Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*
Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16 Oktober 2020	Pengajuan Outline	1.
2.	17 Februari 2021	Proposal Bab I, II, dan III	2.
3.	23 Februari 2021	Revisi dan Acc Proposal	3.
4.	26 Februari 2021	Seminar Proposal	4.
5.	19 Maret 2021	Acc Revisi Seminar Proposal	5.
6.	03 Mei 2021	Skripsi Bab IV dan V	6.
7.	04 April 2021	Skripsi Bab I - V	7.
8.	05 Mei 2021	Revisi dan Acc Bab I - V	8.
9.	06 Mei 2021	Seminar Hasil	9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

Malang,
Mengetahui, Ketua
Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 19751109 199903 1 003

Lampiran 16

Hasil Pengecekan Plagiarisme dengan Turnitin

ORIGINALITY REPORT			
12%	12%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	6%	
2	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	2%	
3	www.scribd.com Internet Source	1%	
4	www.ejournal.unmuha.ac.id Internet Source	1%	
5	ejournal.kopertis10.or.id Internet Source	1%	
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%	
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%	

Lampiran 17
Surat Keterangan Bebas Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile
(0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Novi Isdayanti
NIM : 17540008
Handphone : 081553125025
Konsentrasi : Keuangan
Email : noviisdayanti42@gmail.com
Judul Skripsi : "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
12%	12%	6%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juni 2021
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001